

KATA PENGANTAR

Assamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, atas ijinnya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2012 dapat disusun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2012 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah

Akhirnya, ucapankan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut turut serta memberikan koreksi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga LAKIP Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012 dapat bermanfaat dalam memberikan informasi capaian pelaksanaan kinerja pembangunan khususnya dilingkungan Bappeda dan Pemerintah Daerah Provinsi Banten pada Umumnya.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Serang, Januari 2013

KEPALA,

Ir. WIDODO HADI, Sp
Pembina Utama Madya
NIP. 19570307 198303 1 010

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii-iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Sasaran	3
1.3. Dasar Hukum	4
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi	5
1.5. Struktur Organisasi	27
1.6. Ruang Lingkup Laporan	28
BAB 2 RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROVINSI BANTEN 2007 – 2012	30
2.1. RPJMD Provinsi Banten	30
2.2. Rencana Strategis	31
2.3. Target Kinerja Tahun 2012	36
2.4. Program dan Kegiatan Tahun 2012	37
2.5. Anggaran Per Kegiatan	39
2.6. Tolok Ukur dan Target Kinerja	40
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEDA PROVINSI BANTEN 2012	61
3.1. Akuntabilitas Keuangan	61

3.2. Kinerja Kegiatan	64
3.3. Pengukuran Pencapaian Sasaran	93
BAB 4 PENUTUP	96

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang secara operasional dilakukan melalui program dan kegiatan harus diinformasikan secara akuntabilitas, karena pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ditunjang dengan program dan kegiatan akan membutuhkan biaya pada setiap Tahun Anggarannya.

Penyampaian data dan informasi secara akuntabilitas merupakan pelaporan kinerja dari Instansi pemerintah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku unsur penyelenggara pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dari rencana yang telah ditetapkan pada satu Tahun Anggaran dengan tetap berdasarkan pada perencanaan 5 (lima) Tahun Anggaran atau perencanaan jangka menengah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD)

Selanjutnya dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai wujud dari pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta peningkatan pelaksanaan

pembangunan yang berbasis pelayanan publik, maka perlu adanya suatu pelaporan kinerja dari pelaksanaan rencana pembangunan secara akuntabilitas.

Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku unsur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya harus berdasarkan pada suatu dokumen perencanaan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, karena setiap Instansi Pemerintah berkewajiban menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga sesuai dengan yang diamanatkan dalam keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaporan kinerja ini, dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah atau SKPD dalam satu Tahun Anggaran yang dihubungkan dengan proses tujuan dan sasaran instansi pemerintah atau SKPD yang menjelaskan keberhasilan atau kegagalan pada tingkat kinerja yang dicapainya secara bertanggung jawab.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah disampaikan secara periodik dan akuntabilitas. Artinya bahwa laporan kinerja tersebut merupakan kewajiban untuk disampaikan sebagai pertanggungjawaban kepada pihak yang memiliki hak atau meminta keterangan atau pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran Visi, Misi SKPD yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Laporan kinerja yang disampaikan secara periodik, tersebut adalah merupakan suatu penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang didukung dengan kegiatan program yang pelaksanaannya telah direncanakan secara berkesinambungan baik pada kurun waktu jangka menengah atau Tahunan.

Sehingga laporan kinerja tersebut harus benar-benar transparan, terukur dan harus dapat dipertanggungjawabkan nilai capaiannya secara tepat dan terarah, sehingga laporan kinerja dimaksud merupakan informasi penting bagi pemangku kepentingan baik sebagai informasi biasa maupun sebagai bahan perbaikan instansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang didukung oleh kegiatan program pada periode Tahun Anggaran berikutnya.

1.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta meningkatkan kualitas dan kuantitas data dan informasi kinerja dari instansi pemerintah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, dengan sasaran meliputi sebagai berikut:

1. Tersusunnya Data Dan Informasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Program Pembangunan Instansi Pemerintah Atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Hal Ini Adalah Bappeda Provinsi Banten Yang Sesuai Dengan Tugas, Pokok Dan Fungsi Serta Kewenangannya Untuk Tahun Anggaran 2012.
2. Teridentifikasi Data Capaian Kinerja Dari Indikator Kinerja Kegiatan Program Yang Direncanakan Pada Tahun Anggaran 2012 Sesuai Dengan Yang Tertuang Dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Acuan Pelaksanaan Kegiatan Program Yang Dilaksanakan Oleh Bappeda Provinsi Banten.
3. Teridentifikasi Data Dan Informasi Bahan Penyusunan Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran Berikutnya, Yaitu Tahun Anggaran 2013.

4. Terinformasikan Kinerja Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Bappeda Provinsi Banten Yang Terurai Dalam Indikator Kinerja Yang Telah Ditetapkan Dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012.

1.3. DASAR HUKUM

Dasar hukum dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut ;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
9. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten.
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 No 10)

1.4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten.

Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten. Bappeda Provinsi Banten yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah pemerintah Provinsi, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan fungsi dan tugas mulai dari Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang sebagai berikut:

A. Kepala Badan

Adapun tugas pokoknya adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
2. Penyusunan Rencana Pembangunan Regional Secara Makro;
3. Pengkoordinasian, Memfasilitasi, Dan Menyusun Rencana Strategis Daerah Dan Dokumen Perencanaan Daerah Lainnya;
4. Penyiapan Dan Penyusunan Peraturan Daerah Kebijakan;
5. Penyusunan Rencana Pembiayaan Pembangunan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Baik Belanja Langsung Maupun Belanja Tidak Langsung Dengan Koordinasi Sekretaris Daerah;
6. Penyusunan, Perencanaan, Dan Pengkoordinasian Di Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah, Perekonomian, Sosial Kemasyarakatan, Perencanaan Program Anggaran dan Pembangunan, serta Pengendalian Program Pembangunan;

7. Pengkoordinasian dan Perencanaan Dengan Dinas/Badan/Lembaga Dan Satuan Organisasi Lain Dalam Lingkungan Pemerintahan Provinsi, serta Instansi Pusat di Daerah;
8. Pengawasan Dan Pengevaluasian Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Daerah;
9. Pelaporan Perkembangan Program Dan Atau Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahunan Daerah;
10. Pemberian Fasilitas Dan Media Perencanaan Lintas Kabupaten Dan Kota;
11. Pemberian Pelayanan Informasi Dalam Bidang Kebijakan Perencanaan Daerah;
12. Pengendalian Program Dan Atau Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahunan Daerah;
13. Penataan Dan Pelaksanaan Tugas-tugas Kesekretarian;
14. Pelaksanaan Tugas Lain Sesuai Tugas Dan Fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan Kegiatan Perencanaan Daerah Dengan Dinas, Badan, Lembaga dan Unit Kerja Lain Dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi, Termasuk Dengan Instansi Pusat di Daerah;
- b. Mengkoordinasikan Rencana Pembangunan Dan Tata Ruang Wilayah Regional Secara Makro;
- c. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Strategis Daerah Dan Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Daerah lainnya;
- d. Mengkoordinasikan Penyusunan Program Tahunan yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam Program Tahunan Nasional;
- e. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Dengan Koordinasi Sekretaris Daerah;
- f. Mengawasi dan Mengevaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Daerah;

- g. Memberikan Pelayanan Informasi Tentang Kebijakan Perencanaan Daerah;
- h. Memfasilitasi Dan Mediasi Kegiatan Perencanaan Lintas Kabupaten Dan Kota Dan Antar Wilayah/Provinsi;
- i. Melaksanakan Penyusunan Perencanaan Anggaran Dan Pogram Kerjasama Pembangunan;
- j. Menyelenggarakan Koordinasi Dan Fasilitasi Anggaran Dan Program Kerjasama Pembangunan;
- k. Melaksanakan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Dan Program
- l. Melaksanakan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi Dalam Pelaksanaan Tugas;
- m. Melaksanakan Pembuatan Laporan Tugas dan Fungsinya;
- n. Melaksanakan Tugas lain Sesuai Tugas dan Fungsinya.

B. Sekretaris Badan

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan evaluasi dan pelaporan. Sedangkan fungsi Sekretaris Badan adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan Rencana Program Dan Kegiatan Sesuai Dengan Bidang Tugasnya;
- b. Perumusan Kebijakan, Pedoman, Standardisasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Umum dan Kepegawaian, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Perumusan Pengaturan, Pembinaan, Pengembangan Pelaksanaan Administrasi Umum dan Kepegawaian, Keuangan serta Evaluasi Dan Pelaporan;

- d. Pelaksanaan Evaluasi, Supervisi Dan Pelaporan Kebijakan Standarisasi Program Administrasi Umum Dan Kepegawaian, Keuangan Serta Evaluasi Dan Pelaporan;
- e. Penyiapan Data Dan Bahan Urusan Administrasi Umum Dan Kepegawaian, Keuangan Serta Evaluasi Dan Pelaporan;
- f. Pengelolaan Urusan Administrasi Umum Dan Kepegawaian, Keuangan, Penyusunan Program Evaluasi Dan Pelaporan;
- g. Pelaksanaan Tugas Lain Sesuai Tugas Dan Fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Kerja Kesekretariatan Badan;
- b. Menyiapkan Bahan Kebijakan, Pedoman, Standarisasi, Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian, Keuangan serta Evaluasi Dan Pelaporan;
- c. Menyiapkan Bahan Pembinaan Dan Pengembangan Administrasi Umum Dan Kepegawaian, Keuangan Serta Evaluasi Dan Pelaporan;
- d. Menyiapkan Bahan Administrasi Umum Dan Kepegawaian, Keuangan, Evaluasi Dan Pelaporan;
- e. Menyiapkan Bahan Program Dan Kegiatan Administrasi Umum Dan Kepegawaian, Keuangan Serta Evaluasi Dan Pelaporan;
- f. Menyiapkan Bahan Kegiatan Kesekretariatan, Perlengkapan, Kerumahtanggaan, Perpustakaan, Kehumasan Dan Penyusunan Program;
- g. Menyiapkan Bahan Kegiatan Pengelolaan Keuangan;
- h. Menyiapkan Bahan Administrasi Kepegawaian Badan;
- i. Melaksanakan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi Dan Simplifikasi Dalam Pelaksanaan Tugas;
- j. Melaksanakan Pembuatan Laporan Tugas Dan Fungsinya;
- k. Melaksanakan Tugas Lain Sesuai Tugas Dan Fungsinya.

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya, Sekretaris Badan membawahi dan dibantu oleh:

1. Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumahtangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Kerja Sub-Bagian;
- b. Melaksanakan Administrasi Ketatausahaan Badan;
- c. Melaksanakan Urusan Rumah Tangga Badan;
- d. Melaksanakan Kegiatan Kearsipan Dan Pengelolaan Kepustakaan;
- e. Melaksanakan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Badan;
- f. Melaksanakan Pengelolaan Inventaris Barang Dan Aset Badan;
- g. Melaksanakan Pengelolaan Kebersihan, Ketertiban Dan Keamanan Kantor serta Lingkungannya;
- h. Melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Barang Dan Aset Badan;
- i. Melaksanakan Fungsi Kehumasan;
- j. Melaksanakan Penyiapan Bahan Pembinaan Dan Administrasi Kepegawaian Lingkup Badan;
- k. Melaksanakan Pembuatan Laporan Tugas Dan Fungsinya;
- l. Melaksanakan Tugas Lain Sesuai Tugas Dan Fungsinya.

2. Sub-Bagian Keuangan

Sub-Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Sub-Bagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Kerja Sub-Bagian;
- b. Melaksanakan Penyiapan Rencana Anggaran Pembiayaan Kegiatan di Lingkungan Badan;
- c. Melaksanakan Penyiapan Bahan Pembayaran Dan Pengeluaran Anggaran Belanja Badan Dari Sumber APBD Maupun APBN;
- d. Melaksanakan Kegiatan Perbendaharaan Dalam Rangka Pembiayaan Kegiatan Badan Sesuai Anggaran Yang Telah Ditetapkan;
- e. Melaksanakan Pembayaran Gaji Pegawai Sesuai Ketentuan Yang Berlaku;
- f. Melaksanakan Pembukuan Penerimaan Dan Pengeluaran Keuangan;
- g. Melaksanakan Administrasi Pemungutan, Pelaporan, Dan Penyetoran Pajak-pajak;
- h. Melaksanakan Penyiapan Data, Perhitungan Anggaran Dan Belanja Serta Melaksanakan Fungsi Tata Usaha Keuangan Badan;
- i. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Badan;
- j. Melaksanakan Pengawasan Administrasi Kebendaharawanan Lingkup Badan;
- k. Melaksanakan Pembuatan Laporan Tugas dan Fungsinya;
- l. Melaksanakan Tugas lain sesuai Tugas dan Fungsinya.

3. Sub-Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

Sub-Bagian Program, Evaluasi Dan Pelaporan mempunyai Tugas Pokok Membantu Sekretaris Dalam Melaksanakan Penyiapan Perumusan Program Dan Kegiatan, Evaluasi Dan Pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Kerja Sub-Bagian;
- b. Melaksanakan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dan Rencana Kerja (Renja) Badan;
- c. Melaksanakan Penyiapan Bahan Rencana Anggaran Belanja Badan Untuk Sumber APBD Maupun APBN;
- d. Melakukan Pengolahan Data dan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- e. Menyusun Pelaporan Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Badan;
- f. Melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dan Laporan Kinerja Badan;
- g. Melaksanakan Penyiapan Bahan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Badan;
- h. Melaksanakan Penyiapan Bahan Dalam Rangka Mendukung Dan Membantu Penyelenggaraan Kegiatan Badan;
- i. Melaksanakan Pembuatan Laporan Tugas Dan Fungsinya;
- j. Melaksanakan Tugas lain Sesuai Tugas Dan Fungsinya.

C. Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah

Bidang Penataan Ruang dan Prasarana wilayah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi di bidang Tata Ruang Dan Sumberdaya Alam, serta Penataan Infrastruktur Wilayah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Tata Ruang, Sumberdaya Alam dan Penataan Infrastruktur Wilayah;
- b. Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi, dan Mediasi Perencanaan Pembangunan antar Sektor dan Wilayah di Bidang Tata Ruang, Sumberdaya Alam dan Penataan Infrastruktur Wilayah;
- c. Pengkoordinasian dan Penilaian Kelayakan Usulan-usulan Program/Proyek dan Kegiatan Prioritas untuk Bidang di Bidang Tata Ruang, Sumberdaya Alam dan Penataan Infrastruktur Wilayah;
- d. Pelaksanaan Analisis Permasalahan di Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah serta Merumuskan Langkah-langkah Kebijakan Pemecahannya;
- e. Pelaksanaan Penyiapan Bahan Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Tata Ruang;
- f. Pelaksanaan Tugas lain sesuai Tugas dan Fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Kerja Bidang;
- b. Menyiapkan Bahan Koordinasi, Fasilitasi dan Mediasi Perencanaan Pembangunan antar Sektor dan Wilayah di Bidang Tata Ruang dan Sumberdaya Alam serta Penataan Infrastruktur Wilayah;
- c. Menyiapkan Bahan Pengendalian Kebijakan Perencanaan Tata Ruang Pembangunan antar Sektor dan Wilayah dibidang Tata Ruang dan Sumberdaya Alam serta Penataan Infrastruktur Wilayah;
- d. Menyiapkan Bahan Penilaian Kelayakan Usulan-usulan Program/proyek dan Kegiatan Prioritas di Bidang Tata Ruang dan Sumberdaya Alam serta Penataan Infrastruktur Wilayah;

- e. Menyiapkan Analisis Permasalahan di Bidang Tata Ruang dan Sumberdaya Alam serta Penataan Infrastruktur Wilayah serta Merumuskan Langkah-langkah Kebijakan Pemecahannya;
- f. Menyiapkan Program Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah dengan Rencana Strategis Badan;
- g. Menyiapkan Bahan Koordinasi dengan Unit Kerja atau Satuan Kerja terkait;
- h. Melaksanakan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Simplifikasi dalam Pelaksanaan Tugas;
- i. Melaksanakan Pembuatan Laporan Tugas dan Fungsinya;
- j. Melaksanakan Tugas lain sesuai Tugas dan Fungsinya.

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya, Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan membawahi dan dibantu oleh

1. Sub-Bidang Tata Ruang dan Sumber Daya Alam;

Sub-Bidang Tata Ruang dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan Tata Ruang dan Sumberdaya alam.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Sub-Bidang Tata Ruang dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Kerja Sub-Bidang;
- b. Mengidentifikasi, Mengumpulkan dan Menyusun Bahan-bahan Koordinasi tentang Perencanaan Tata Ruang dan Sumberdaya Alam;
- c. Melaksanakan Penyiapan Bahan untuk Perumusan dan Penetapan Kebijakan Perencanaan Tata Ruang dan Sumberdaya Alam;
- d. Melaksanakan Penyiapan Bahan Pengendalian Kebijakan Perencanaan Tata Ruang dan Sumberdaya Alam;
- e. Melaksanakan Pengolahan Data dan Informasi di Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Sumberdaya Alam;
- f. Melaksanakan Koordinasi dengan Unit Kerja atau Satuan Kerja Terkait;

- g. Melaksanakan Pembuatan Laporan Tugas dan Fungsinya;
- h. Melaksanakan Tugas lain sesuai Tugas dan Fungsinya.

2. Sub-Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah

Sub-Bidang Penataan Insfrastruktur wilayah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan penataan infrastruktur wilayah.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Sub-Bidang Tata Ruang dan Sumberdaya Alam mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Kerja Sub-Bidang;
- b. Mengidentifikasi, Mengumpulkan dan Menyusun Bahan-bahan Koordinasi tentang Perencanaan Penataan Infrastruktur Wilayah;
- c. Melaksanakan Penyiapan bahan untuk Perumusan dan Penetapan Kebijakan Perencanaan Penataan Infrastruktur Wilayah;
- d. Melaksanakan Penyiapan Bahan Pengendalian Kebijakan Perencanaan Penataan Infrastruktur Wilayah;
- e. Melaksanakan Pengolahan Data dan Informasi di Bidang Perencanaan Penataan Infrastruktur Wilayah;
- f. Melaksanakan Koordinasi dengan Unit Kerja atau Satuan Kerja Terkait;
- g. Melaksanakan Pembuatan Laporan Tugas dan Fungsinya;
- h. Melaksanakan Tugas lain sesuai Tugas dan Fungsinya.

D. Bidang Perekonomian

Bidang Perekonomian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi di bidang Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, Budaya, Pariwisata, Investasi, Agribisnis dan Bisnis Kelautan Kehutanan dan Perkebunan, Pertanian dan Peternakan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Perekonomian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi, Budaya, Pariwisata, Investasi, Agribisnis dan Bisnis Kelautan, Hutbun, Pertanian dan Peternakan;
- b. Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi, dan Mediasi Perencanaan Pembangunan antar Sektor dan Wilayah dibidang Industri, Perdagangan, Koperasi UMKM, Budaya, Pariwisata, Investasi, Agribisnis dan Bisnis Kelautan, Hutbun, Pertanian dan Peternakan;
- c. Pengkoordinasian dan Penilaian Kelayakan Usulan-usulan Program/proyek dan Kegiatan Prioritas untuk Sektor Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, Budaya, Pariwisata, Investasi, Agribisnis dan Bisnis Kelautan, Hutbun, Pertanian dan Peternakan;
- d. Pelaksanaan Analisis Permasalahan dibidang Perekonomian serta Merumuskan Langkah-langkah Kebijakan Pemecahannya;
- e. Pelaksanaan Tugas lain sesuai Tugas dan Fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Perekonomian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Kerja Bidang;
- b. Menyiapkan Bahan Koordinasi, Fasilitasi dan Mediasi Perencanaan Pembangunan di Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, Budaya, Pariwisata, Investasi, Agribisnis dan Bisnis Kelautan Hutbun, Pertanian dan Peternakan;
- c. Menyiapkan Bahan Pengendalian Kebijakan Perencanaan Industri, Perdagangan, Koperasi, Budaya, Pariwisata, Investasi, Agribisnis dan Bisnis Kelautan;
- d. Menyiapkan Bahan Penilaian Kelayakan Usulan-usulan Program/proyek dan Kegiatan Prioritas di Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi, Budaya, Pariwisata, Investasi, Agribisnis dan Bisnis Kelautan;

- e. Menyiapkan Analisis Permasalahan di Industri, Perdagangan, Koperasi, Budaya, Pariwisata, Investasi, Agribisnis dan Bisnis Kelautan serta Merumuskan Langkah-langkah Kebijakan Pemecahannya;
- f. Menyiapkan Program Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi, Budaya, Pariwisata, Investasi, Agribisnis dan Bisnis Kelautan;
- g. Melaksanakan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Simplifikasi dalam Pelaksanaan Tugas;
- h. Melaksanakan Pembuatan Laporan Tugas dan Fungsinya;
- i. Melaksanakan Tugas lain sesuai Tugas dan Fungsinya.

Dalam Pelaksanaan Fungsi dan Tugasnya, Bidang Perekonomian Membawahi dan dibantu oleh:

1. Sub-Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, Budaya, Pariwisata dan Investasi

Sub-Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi, Budaya, Pariwisata dan Investasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perekonomian dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di bidang Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, Budaya, Pariwisata dan Investasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Sub-Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi, Budaya, Pariwisata dan Investasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Kerja Sub-Bidang;
- b. Mengidentifikasi, Mengumpulkan dan Menyusun Bahan-bahan Koordinasi tentang Perencanaan di Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, Budaya, Pariwisata dan Investasi;
- c. Melaksanakan Penyiapan Bahan untuk Perumusan dan Penetapan Kebijakan Perencanaan di Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, Budaya, Pariwisata dan Investasi;

- d. Melaksanakan Penyiapan Bahan Pengendalian Kebijakan Perencanaan di Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, Budaya, Pariwisata dan Investasi;
- e. Melaksanakan Pengolahan Data dan Informasi di Bidang Perencanaan di Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, Budaya, Pariwisata dan Investasi;
- f. Melaksanakan Koordinasi dengan Unit Kerja atau Satuan Kerja terkait;
- g. Melaksanakan Pembuatan Laporan Tugas dan Fungsinya;
- h. Melaksanakan Tugas lain sesuai Tugas dan Fungsinya.

2. Sub-Bidang Agribisnis dan Bisnis Kelautan

Sub-Bidang Agribisnis dan Bisnis Kelautan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perekonomian dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di bidang agribisnis dan bisnis kelautan

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Sub-Bidang Agribisnis dan Bisnis Kelautan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Kerja Sub-Bidang;
- b. Mengidentifikasi, Mengumpulkan dan Menyusun Bahan-bahan Koordinasi tentang Perencanaan di Bidang Agribisnis dan Bisnis Kelautan, Hutbun, Pertanian dan Peternakan;
- c. Melaksanakan Penyiapan Bahan untuk Perumusan dan Penetapan Kebijakan Perencanaan di Bidang Agribisnis dan Bisnis Kelautan, Hutbun, Pertanian dan Peternakan;
- d. Melaksanakan Penyiapan Bahan Pengendalian Kebijakan Perencanaan di Bidang Agribisnis dan Bisnis Kelautan, Hutbun, Pertanian dan Peternakan;

- e. Melaksanakan Pengolahan Data dan Informasi di Bidang Perencanaan di Bidang Agribisnis dan Bisnis Kelautan, Hutbun, Pertanian dan Peternakan;
- f. Melaksanakan Koordinasi dengan Unit Kerja atau Satuan Kerja Terkait;
- g. Melaksanakan Pembuatan Laporan Tugas dan Fungsinya;
- h. Melaksanakan Tugas lain sesuai Tugas dan Fungsinya.

E. Bidang Sosial Kemasyarakatan

Bidang Sosial Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi di bidang Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan, Politik dan Pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Sosial Kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan, Politik dan Pemerintahan;
- b. Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi dan Mediasi Perencanaan Pembangunan antar Sektor dan Wilayah di Bidang Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan, Politik dan Pemerintahan;
- c. Pengkoordinasian dan Penilaian Kelayakan Usulan-usulan Program/proyek dan Kegiatan Prioritas untuk Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan, Politik dan Pemerintahan;
- d. Pelaksanaan Analisis Permasalahan dibidang Sosial Kemasyarakatan serta Merumuskan Langkah-langkah Kebijakan Pemecahannya;
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Kerja Bidang;
- b. Menyiapkan Bahan Koordinasi, Fasilitasi dan Mediasi Perencanaan Pembangunan dibidang Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja, pemberdayaan perempuan, pendidikan, politik dan pemerintahan;
- c. Menyiapkan bahan pengendalian kebijakan perencanaan kesehatan, kesejahteraan sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, pendidikan, politik dan pemerintahan;
- d. Merumuskan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/proyek dan kegiatan prioritas di bidang kesehatan, kesejahteraan sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, pendidikan, politik dan pemerintahan;
- e. Menyiapkan analisis permasalahan di industri, perdagangan, koperasi, budaya, pariwisata, investasi, agribisnis dan bisnis kelautan serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
- f. Menyiapkan program bidang kesehatan, kesejahteraan sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, pendidikan, politik dan pemerintahan;
- g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya, Bidang Sosial Kemasyarakatan membawahi dan dibantu oleh:

1. Sub-Bidang Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Perempuan

Sub-Bidang Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan dalam melaksanakan penyiapan bahan

perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di bidang kesehatan, kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan pemberdayaan perempuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Sub-Bidang Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja Sub-Bidang;
- b. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan di bidang kesehatan, kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan pemberdayaan perempuan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di bidang kesehatan, kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan pemberdayaan perempuan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian kebijakan perencanaan di kesehatan, kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan pemberdayaan perempuan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
- f. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sub-Bidang Pendidikan, Politik dan Pemerintahan

Sub-Bidang Pendidikan, Politik dan Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di bidang Pendidikan, Politik dan Pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Sub-Bidang Pendidikan, Politik dan Pemerintahan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja Sub-Bidang;

- b. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan di bidang Pendidikan, Politik dan Pemerintahan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di bidang Pendidikan, Politik dan Pemerintahan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan Pengendalian Kebijakan Perencanaan Pendidikan, Politik dan Pemerintahan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
- f. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

F. Bidang Perencanaan Program Anggaran dan Pembangunan

Bidang Perencanaan Program Anggaran dan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi di bidang Perencanaan Penganggaran Pembangunan dan Program Pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Perencanaan Program Anggaran dan Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan Perencanaan Penganggaran Pembangunan dan Program Pembangunan;
- b. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mediasi Perencanaan Pembangunan antar sektor dan wilayah di bidang Penganggaran Pembangunan dan Program Pembangunan;
- c. Pengkoordinasian dan penilaian kelayakan usulan-usulan program/proyek dan kegiatan prioritas untuk sektor penganggaran pembangunan dan program pembangunan;
- d. Pelaksanaan analisis permasalahan di bidang penganggaran merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya; pembangunan dan program pembangunan serta

- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Perencanaan Program Anggaran dan Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Kerja Bidang;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan di bidang Perencanaan Program Anggaran dan Pembangunan;
- c. Menyiapkan bahan Pengendalian Kebijakan Perencanaan Program Anggaran Pembangunan dan Program Pembangunan;
- d. Menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/proyek dan kegiatan prioritas di bidang Perencanaan Program Anggaran dan Pembangunan;
- e. Menyiapkan Analisis Permasalahan Perencanaan Anggaran Pembangunan dan Program Pembangunan Serta Merumuskan Langkah-Langkah Kebijakan Pemecahannya;
- f. Menyiapkan program Bidang Perencanaan Program Anggaran dan Pembangunan;
- g. Melaksanakan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Simplifikasi dalam Pelaksanaan Tugas;
- h. Melaksanakan Pembuatan Laporan Tugas dan Fungsinya;
- i. Melaksanakan Tugas Lain Sesuai Tugas dan Fungsinya.

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya, Bidang Perencanaan Program Anggaran dan Pembangunan membawahi dan dibantu oleh:

1. Sub-Bidang Perencanaan Penganggaran Pembangunan

Sub-Bidang Perencanaan Penganggaran Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan Program Anggaran dan Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di bidang perencanaan penganggaran pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Sub-Bidang Perencanaan Penganggaran Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja Sub-Bidang;
- b. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan di bidang perencanaan penganggaran pembangunan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di bidang perencanaan penganggaran pembangunan;
- d. Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan Pengendalian Kebijakan Perencanaan Penganggaran Pembangunan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
- g. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sub-Bidang Dokumen Perencanaan

Sub-Bidang Perencanaan Program Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan Program Anggaran dan Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di bidang Perencanaan Program Pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Sub-Bidang Perencanaan Program Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Kerja Sub-Bidang;
- b. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk dokumen perencanaan pembangunan daerah;

- c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan program pembangunan untuk dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian kebijakan perencanaan program pembangunan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
- f. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

G. Bidang Pengendalian Program Pembangunan

Bidang Pengendalian Program Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan di bidang monitoring dan evaluasi anggaran penerimaan belanja daerah serta kerjasama pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pengendalian Program Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan di bidang monitoring dan evaluasi anggaran penerimaan belanja daerah serta kerjasama pembangunan;
- b. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan wilayah di bidang monitoring dan evaluasi anggaran penerimaan belanja daerah serta kerjasama pembangunan;
- c. Pengkoordinasian dan penilaian kelayakan usulan-usulan program/proyek dan kegiatan prioritas untuk sektor monitoring dan evaluasi anggaran penerimaan belanja daerah serta kerjasama pembangunan;
- d. Pelaksanaan analisis permasalahan di bidang di bidang monitoring dan evaluasi anggaran penerimaan belanja daerah serta kerjasama pembangunan serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Pengendalian Program Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Bidang;
- b. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan di bidang di bidang monitoring dan evaluasi anggaran penerimaan belanja daerah serta kerjasama pembangunan;
- c. menyiapkan bahan pengendalian kebijakan di bidang monitoring dan evaluasi anggaran penerimaan belanja daerah serta kerjasama pembangunan;
- d. menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/proyek dan kegiatan prioritas di bidang di bidang monitoring dan evaluasi anggaran penerimaan belanja daerah serta kerjasama pembangunan;
- e. menyiapkan analisis permasalahan perencanaan program di bidang monitoring dan evaluasi anggaran penerimaan belanja daerah serta kerjasama pembangunan serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
- f. menyiapkan program bidang perencanaan program anggaran dan pembangunan;
- g. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya, Pengendalian Program Pembangunan membawahi dan dibantu oleh:

1. Sub-Bidang Monitoring dan Evaluasi Anggaran Penerimaan Belanja Daerah

Sub-Bidang Perencanaan Program Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengendalian Program Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan

perencanaan di bidang monitoring dan evaluasi anggaran penerimaan belanja daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Sub-Bidang Monitoring dan Evaluasi Anggaran Penerimaan Belanja Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja Sub-Bidang;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sumber dana APBD dan APBN;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan berdasarkan hasil pengendalian monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait pada pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- f. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sub-Bidang Kerjasama Pembangunan

Sub-Bidang Kerjasama Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengendalian Program Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di bidang kerjasama pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Sub-Bidang Kerjasama Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut:

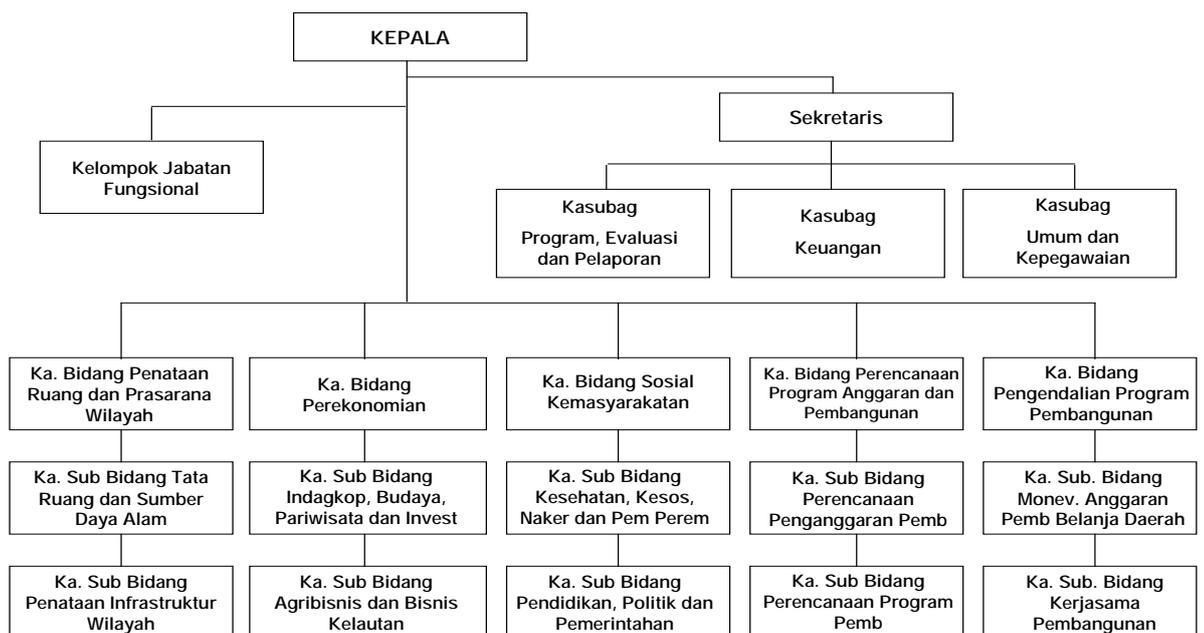
- a. Menyusun rencana kerja Sub-Bidang;

- b. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi perencanaan di bidang kerjasama pembangunan;
- c. Melaksanakan penyiapan, perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di bidang kerjasama pembangunan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan kerjasama pembangunan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
- f. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

1.5. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Bappeda Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

STRUKTUR BAPPEDA PROVINSI BANTEN



Sumber: Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2008

1.6. RUANG LINGKUP LAPORAN

Ruang Lingkup pelaporan adalah laporan kinerja yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran pada Tahun 2011, yang terdiri dari laporan Pengukuran Kinerja kegiatan dengan indikator kinerja yang harus dicapai adalah indikator Kinerja **Input** (anggaran), **Output** (keluaran langsung), **Outcome** yang merupakan fungsi dari **Output** dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dengan indikator kinerja yang harus dicapai adalah indikator kinerja capaian program dari sasaran program 5 (lima) tahun yang berdasarkan dari Perencanaan Kinerja Tahunan.

Pengertian dari indikator kinerja disini adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan, yang terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa pengukuran kinerja adalah terdiri dari indikator **input**, **output** dan **outcome**, dan berdasarkan Keputusan kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bahwa pengertian indikator kinerja **input**, **output** dan **outcome** adalah sebagai berikut :

- a. **Inputs** adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan **outputs**, diantaranya adalah dana.
- b. **Outputs** adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
- c. **Outomes** adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah atau merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Sedangkan pengertian capaian program dalam hal ini adalah berdasarkan pada permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu sasaran program yang dicapai dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dari 5 (lima) Tahun yang direncanakan.

Pengukuran kinerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan program pembangunan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) adalah sebagai dasar untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah/SKPD.

Pengukuran tersebut merupakan kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator kinerja *input*, *output*, *outcome* dan capaian program sebagaimana telah diuraikan diatas, dan penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah *input* menjadi *output* atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan cukup berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam rangka pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, pengukuran kinerja ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja kegiatan yang telah disusun oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten, disamping itu pula dilakukan koordinasi pembahasan data bahan penyusunan laporan kinerja secara internal agar diperoleh bahan dengan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten.

Sebagai penilaian dari pengukuran kinerja yang telah ditetapkan baik pada Pengukuran Kinerja Kegiatan dan pengukuran Pencapaian Sasaran untuk klasifikasi nilai capaian kinerja dan predikatnya adalah sebagai berikut :

N0	KLASIFIKASI NILAI CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT
1	Lebih dari 80 %	Sangat Baik
2	70 % - 79 %	Baik
4	60 % - 69 %	Sedang
5	50 % - 59 %	Kurang
6	Kurang dari 50 %	Sangat kurang

BAB 2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RPJMD PROVINSI BANTEN

Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Tahun 2007 – 2012 dengan memperhatikan agenda dan prioritas pembangunan nasional (RPJMN), serta komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten. Kesejahteraan masyarakat merupakan harapan dan aspirasi serta keinginan luhur masyarakat Banten yang tercermin dalam Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Banten.

Periode tahun 2007-2012, Visi Pembangunan Provinsi Banten adalah “RAKYAT BANTEN SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”, sehingga diharapkan seluruh stakeholder di Provinsi Banten secara bahu membahu mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan masyarakat Banten sejahtera.

Keberhasilan pencapaian sasaran agenda pembangunan melalui pencapaian indikator kinerja pada masing – masing agenda, merupakan ukuran keberhasilan pembangunan daerah yang diwujudkan dalam visi – misi pembangunan 5 (lima) tahun yang ditetapkan. Sehingga dalam tahun 2012 ini, target pencapaian Indikator Makro Pembangunan (IMP) adalah :

1. Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan sebesar 72,88 %;
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan sebesar 6,5 – 6,8 %;
3. Indeks Pembangunan Daerah ditargetkan sebesar 89,2 – 98 %;
4. Indeks Pembangunan Gender (IPG) ditargetkan sebesar 67,4 %;
5. Penurunan Jumlah Penduduk Kategori Sangat Miskin ditargetkan sebesar 650.000 – 600.000 jiwa;

Penurunan Jumlah Pengangguran Terbuka yang ditargetkan sebesar 620.000 – 600.000 jiwa.

2.2. RENCANA STRATEGIS

Bappeda Provinsi Banten terbentuk atas dasar Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten. Bappeda Provinsi Banten merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten yang memiliki otoritas pada urusan Perencanaan Pembangunan dan Penataan Ruang.

Peran Bappeda Provinsi Banten diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah Provinsi Banten pada urusan Perencanaan Pembangunan dan Penataan Ruang. Selanjutnya dengan upaya tersebut dan berpijak pada kedudukan, tugas pokok dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi dalam urusan Perencanaan Pembangunan Penataan Ruang dalam kurun waktu Tahun 2010-2030 maka Bappeda Provinsi Banten menetapkan Visi Tahun 2007-2012 sebagai berikut:

“ PROFESIONAL DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH”

Makna yang terkandung dalam Visi Bappeda Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

1. Profesional

- Mampu Dan Berkualitas Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi Kelembagaan Yang Didasari Pada Kerangka Regulasi Dan Ketentuan Organisasi;
- Mampu Dan Berkualitas Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Kelembagaan Yang Didukung Oleh Sumber Daya Aparatur Yang Kompeten;
- Mampu Dan Berkualitas Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Kelembagaan Yang Berorientasi Pada Peningkatan Kinerja Dan Pelayanan Publik.

2. Perencanaan Pembangunan Daerah

- Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Bermutu dan Akuntabel;
- Perencanaan Pembangunan yang berdasarkan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Perencanaan pembangunan daerah yang berdasarkan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
- Perencanaan pembangunan daerah yang berdasarkan tahapan dan proses secara terkoordinasi dengan memperhatikan pendekatan partisipatif dan Bottom Up Planing.

Visi Bappeda Provinsi Banten Tahun 2007-2012 tersebut diharapkan menjadi menjadi pilar utama dalam aspek perencanaan pembangunan guna mendukung pencapaian Visi Daerah Provinsi Banten Tahun 2007-2012

“Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa ”.

Sebagai upaya untuk mencapai visi yang telah ditentukan perlu ditetapkan misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, dan misi merupakan pernyataan dari ruang lingkup tugas pokok dan fungsi organisasi sarannya secara operasional akan dicapai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap Tahun.

Dalam rangka mendukung pencapaian misi daerah serta untuk mencapai Visi **“Profesional Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah”** maka Bappeda Provinsi Banten menetapkan Misi 2007-2012 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur
2. Meningkatkan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3. Mendayagunakan dan Mengembangkan Sistem, Data dan Informasi Pembangunan Daerah

Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2007-2012 menurut rumusan Misi adalah sebagai berikut:

Tujuan dan **Sasaran** yang akan dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2007-2012 berdasarkan rumusan **Misi** adalah sebagai berikut:

1. **Misi 1** : **Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur** dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi memiliki tujuan untuk **Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Peran Kelembagaan**. Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:
 - Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Aparatur
 - Meningkatnya Manajemen Kelembagaan
 - Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur

2. **Misi 2** : **Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah** yang ditujukan untuk **Meningkatkan Kualitas Pembangunan Daerah**. Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:
 - Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Meningkatnya Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 - Meningkatnya Kerjasama Pembangunan Daerah

3. **Misi 3** : **Mendayagunakan dan Mengembangkan Sistem, Data dan Informasi Pembangunan Daerah**, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan informasi pelaksanaan pembangunan daerah. Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:
 - Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Pembangunan yang Akurat dan Mutakhir
 - Meningkatnya Pelayanan Data dan Informasi Pembangunan
 - Meningkatnya Daya Guna Penelitian Pembangunan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi sebagai suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan dan

strategi yang perlu dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten untuk waktu 5 (lima) Tahun kedepan diantaranya adalah berikut:

1. **Strategi** dalam rangka mewujudkan Misi “**Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur**”, adalah:
 - Membangun sumber daya aparatur secara profesional yang diikuti dan didukung dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas;
2. **Strategi** dalam rangka mewujudkan Misi “**Meningkatkan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**”, adalah:
 - Membangun sistem, proses dan tahapan serta pendekatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan secara tepat, terarah dan terkoordinasi;
 - Mengarahkan perencanaan wilayah secara tepat dan terarah sesuai dengan kondisi, potensi karakteristik dan pemanfaatan wilayah.
3. **Strategi** dalam rangka mewujudkan Misi “**Mendayagunakan dan Mengembangkan Sistem, Data dan Informasi Pembangunan Daerah**” adalah:
 - Meningkatkan ketersediaan data yang lengkap, akurat dan mutakhir, sebagai bahan informasi dan perencanaan pembangunan daerah;

Sedangkan Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan strategi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2007-2012 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten serta melengkapi bahan dan peralatan kerja aparatur yang cukup memadai;
2. Melakukan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah melalui koordinasi dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
3. Pengadaan dan pengendalian data informasi serta mengembangkan sistem dan informasi secara lengkap, tepat dan akurat untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah berkelanjutan;

4. Melakukan perencanaan Tata Ruang Wilayah dan rencana pembangunan regional secara makro melalui koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan Provinsi lainnya (yang berbatasan dengan Provinsi Banten)

Berikut adalah keterkaitan Misi, Strategi dan Kebijakan Bappeda Provinsi Banten Tahun 2007-2012 adalah:

Strategi dan Kebijakan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten 2007-2012

Misi		Strategi		Kebijakan	
No	Uraian	No	Uraian	No	Uraian
1	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur	1.1	Membangun sumber daya aparatur secara profesional yang diikuti dan didukung dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas	1.1.1	Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten serta melengkapi bahan dan peralatan kerja aparatur yang cukup memadai
2	Meningkatkan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.1	Membangun sistem, proses dan tahapan serta pendekatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan secara tepat, terarah dan terkoordinasi	2.1.1	Melakukan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah melalui koordinasi dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku
		2.2	Mengarahkan perencanaan wilayah secara tepat dan	2.2.2	Melakukan perencanaan Tata Ruang Wilayah dan

Misi		Strategi		Kebijakan	
No	Uraian	No	Uraian	No	Uraian
			terarah sesuai dengan kondisi, potensi karakteristik dan pemanfaatan wilayah		rencana pembangunan regional secara makro melalui koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan Provinsi lainnya (yang berbatasan dengan Provinsi Banten)
3	Mendayagunakan dan Mengembangkan Sistem, Data dan Informasi Pembangunan Daerah	3.1	Meningkatkan ketersediaan data yang lengkap, akurat dan mutakhir, sebagai bahan informasi dan perencanaan pembangunan daerah	3.1.1	Pengadaan dan pengendalian data informasi serta mengembangkan sistem dan informasi secara lengkap, tepat dan akurat untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah berkelanjutan

2.3. Target Kinerja Tahun 2012

1. Target Kinerja Utama

- a. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD, RKPD, MUSRENBANG)
- b. Tersusunnya Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program (APBD & APBN) (LKPI, LAKIP, TAPKIN)
- c. Terlaksananya PERDA RTRW Tahun 2010-2030

2. Target Kinerja Pendukung

- a. Tersusunnya Rancangan RKPD Agenda Pemerintahan
- b. Tersusunnya Rancangan RKPD Agenda Pengembangan Sumber Daya Manusia

- c. Tersusunnya Rancangan RKPD Agenda Perekonomian
- d. Tersusunnya Rancangan RKPD Agenda Pengembangan Wilayah dan Kawasan
- e. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kerjasama Pembangunan dan Perencanaan Strategis
- f. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Bappeda Provinsi Banten

2.4. Program dan Kegiatan Tahun 2012

untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan dan strategi yang perlu dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten tahun 2012 akan melaksanakan 4 (empat) Program dan 19 (sembilan belas) kegiatan, sebagai berikut :

1. **Program** Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah Daerah.
 - 1) **Kegiatan** Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan Aparatur Bappeda Provinsi Banten.
 - 2) **Kegiatan** Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran BAPPEDA Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012.
 - 3) **Kegiatan** Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana Prasarana Perkantoran BAPPEDA Provinsi Banten.
 - 4) **Kegiatan** Pengadaan Sarana Prasarana Perkantoran BAPPEDA Provinsi Banten.
 - 5) **Kegiatan** Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012.
 - 6) **Kegiatan** Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - 7) **Kegiatan** Penyusunan Dan Penyediaan Data Provinsi Banten.
 - 8) **Kegiatan** Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.

2. **Program** Perencanaan Pembangunan.
 - 1) **Kegiatan** Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
 - 2) **Kegiatan** Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pendidikan, Pemerintahan dan Politik.
 - 3) **Kegiatan** Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Kesehatan, Kesos, Naker dan PP PA.
 - 4) **Kegiatan** Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Wilayah.
 - 5) **Kegiatan** Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten.
 - 6) **Kegiatan** Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah.
 - 7) **Kegiatan** Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Agribisnis dan Bisnis Kelautan.
 - 8) **Kegiatan** Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Indagkop, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata.
 - 9) **Kegiatan** Koordinasi Perencanaan Program Pembangunan Daerah.
3. **Program** Peningkatan Kerjasama Pembangunan.
 - 1) **Kegiatan** Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan.
4. **Program** Penataan Ruang.
 - 1) **Kegiatan** Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

2.5. Anggaran per kegiatan

Anggaran kegiatan pada tahun 2012, sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	
		MURNI	PERUBAHAN
I Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah Daerah			
1	Pembinaan dan Peningkatan Aparatur Bappeda Provinsi Banten	560.000.000,-	575.000.000,-
2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran BAPPEDA Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012	3.560.000.000,-	3.600.950.000,-
3	Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana Prasarana Perkantoran BAPPEDA Provinsi Banten	1.600.000.000,-	1.827.399.500,-
4	Pengadaan Sarana Prasarana Perkantoran BAPPEDA Provinsi Banten	1.676.000.000,-	1.846.758.050,-
5	Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012	500.000.000,-	500.000.000,-
6	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Provinsi Banten	1.000.000.000,-	1.202.192.500,-
7	Penyusunan Dan Penyediaan Data Provinsi Banten	618.000.000,-	618.000.000,-
8	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	300.000.000,-	299.999.950,-
II Perencanaan Pembangunan			
9	Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	700.000.000,-	700.000.000,-
10	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pendidikan, Pemerintahan dan Politik	900.000.000,-	925.000.000,-
11	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Kesehatan, Kesos, Naker dan PP PA	905.000.000,-	904.700.000,-
12	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Wilayah	1.200.000.000,-	1.200.000.000,-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	
		MURNI	PERUBAHAN
13	Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten	1.700.000.000,-	1.700.000.000,-
14	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah	1.170.000.000,-	975.000.000,-
15	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Agribisnis dan Bisnis Kelautan	850.000.000,-	850.000.000,-
16	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Indagkop, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata	1.503.000.000,-	1.503.000.000,-
17	Koordinasi Perencanaan Program Pembangunan Daerah	2.030.000.000,-	2.080.000.000,-
III Peningkatan Kerjasama Pembangunan			
18	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan	850.000.000,-	850.000.000,-
IV Penataan Ruang			
19	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1.300.000.000,-	1.300.000.000,-
TOTAL		22.922.000.000,-	23.458.000.000,-

2.6. Tolok Ukur Dan Target Kinerja

Rencana Tolok Ukur Kinerja tahun 2012 kegiatan Bappeda Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan Aparatur Bappeda Provinsi Banten	1. Pelayanan Prima Aparatur Bappeda Provinsi Banten	100 org

NO	KEGIATAN	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
		2. Bimbingan Teknis Kearsipan Internal Bappeda Provinsi Banten	40 org
		3. Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan golongan PNS Bappeda Provinsi Banten	2 kali
		4. Fasilitasi Kenaikan Gaji Berkala PNS Bappeda Provinsi Banten	24 org
		5. Fasilitasi Perkuatan Kelembagaan dan Validasi Data Pegawai Bappeda Provinsi Banten	87 org
		6. Pemutakhiran Data Kepegawaian Bappeda Provinsi Banten	87 org
		7. Pekan Ilmiah Internal Bappeda Provinsi Banten	10 kali
		8. Fasilitasi Pengiriman Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3 org
		9. Koordinasi/Konsultasi Kepegawaian	6 kali
2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran BAPPEDA Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012	1. Pengadaan Bahan Pakai Habis	12 bulan
		2. Pengadaan Bahan Cetak	12 bulan
		3. Pengadaan Makan dan Minuman Kantor	12 bulan
		4. Pengadaan Jasa Telepon, Listrik dan Pengumuman Lelang, PHBI, PHBN	12 bulan

NO	KEGIATAN	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
		5. Konsultasi dan Koordinasi Ke Dalam dan Luar Wilayah Provinsi	12 bulan
		6. Fasilitasi Penunjang Kegiatan dan Kantor	12 bulan
3	Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana Prasarana Perkantoran BAPPEDA Provinsi Banten	1. Pemeliharaan Gedung dan Halaman	12 bulan
		2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	12 bulan 18 Unit Roda empat dan 19 Unit Roda dua
		3. Pemeliharaan Barang Inventarisasi Kantor	155 unit
4	Pengadaan Sarana Prasarana Perkantoran BAPPEDA Provinsi Banten	1. Pengadaan Sarana Prasarana Perkantoran	1147 unit
5	Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012	1. Penyusunan Dokumen Evaluasi LRA, Neraca dan CaLK SKPD Bappeda Provinsi Banten TA. 2011	1 dok
		2. Penyusunan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Anggaran Internal Bappeda Provinsi Banten	1 dok
		3. Penyusunan Dokumen SPP, SPM, SP2D dan SPJ Kegiatan Bappeda Provinsi Banten TA.2012 untuk Periode TW I; TW II; TW III; TW IV.	1 dok
		4. Penyusunan Dokumen LRA, Neraca dan CaLK Laporan Akuntabilitas Kegiatan Bappeda Provinsi Banten TA. 2012 Periode Semester I	1 dok

NO	KEGIATAN	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
		dan Semester II	
		5. Penyusunan Verifikasi Kode Rekening anggaran dan Penyesuaian Tarif Harga Satuan sesuai Standar Biaya Umum pada Kegiatan Bappeda Provinsi Banten TA. 2012	1 dok
		6. Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan Pencocokan Data Akuntansi dan Data Aset Kegiatan Bappeda Provinsi Banten TA. 2012	1 dok
		7. Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Inventarisasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Aparat Pemeriksa Instansi Pemerintah (Inspektorat, Itjen Kemendagri, BPKP dan BPK RI)	1 dok
		8. Penyusunan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP) TA. 2012	1 dok
		9. Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Inventarisasi Aset Kegiatan Bappeda Provinsi Banten TA. 2012	1 dok
		10. Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi Data Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Sumber Dana APBN TA. 2012 Periode TW I; TW II; TW III; TW IV	1 dok

NO	KEGIATAN	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
		11. Penyusunan Dokumen Neraca, LRA dan CaLK Kegiatan Sumber Dana APBN Satker Bappeda Provinsi Banten TA. 2012 periode Semester I dan Semester II	1 dok
6	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1. Penyusunan Dokumen Rencana Operasional Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012	1 dok
		2. Penyusunan Dokumen LAKIP Bappeda Provinsi Banten Tahun 2011	1 dok
		3. Penyusunan Dokumen LKPJ Bappeda Provinsi Banten Tahun 2011	1 dok
		4. Penyusunan Dokumen LPPD Bappeda Provinsi Banten Tahun 2011	1 dok
		5. Penyusunan Dokumen Laporan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012	4 dok
		6. Penyusunan Dokumen RENJA Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013	12 dok
		7. Penyusunan Dokumen Kerangka Logis dan Perubahan Penganggaran Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012	4 dok
		8. Penyusunan Dokumen Kerangka Logis dan Penganggaran	6 dok

NO	KEGIATAN	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
		Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013	
		9. Penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013	1 dok
		10. Penyelenggaraan Forum SKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Tahun 2012	1 dok
		11. Penyusunan RENSTRA Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017	1 dok
		12. Penyusunan TAPKIN dan IKU Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012	2 dok
		13. Penyusunan SOTK dan TUPOKSI Bappeda Prov. Banten	1 kali
		14. Penyelenggaraan Forum Bappeda Prov. Banten dan Kab/Kota sep Provinsi Banten	1 kali
		15. Monitoring Penyusunan Data Makro Pembangunan	1 dok
7	Penyusunan dan Penyediaan Data Provinsi Banten	1. Koordinasi dan Konsultasi Data Daerah	1 dok
		2. Penyusunan Kajian Akademis Pembentukan UPTB Data dan Informasi Bappeda Provinsi Banten	1 dok
		3. Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan	4 dok
		4. Penyusunan Profile Informasi	1 dok

NO	KEGIATAN	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
		Pembangunan	
		5. Pelaporan Kinerja Kegiatan	1 dok
8	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	1. Fasilitasi Monitoring Kegiatan Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan untuk Desentralisasi (Sustainable Capacity Building For Decentralization) di Provinsi Banten	1 dok
		2. Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMBRENDA)	1 dok
		3. Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Pelaporan Triwulanan APBD (SIMPEL)	1 dok
		4. Monitoring Implementasi CB-AP SCBD Kabupaten/Kota	1 dok
		5. Evaluasi Implementasi CB-AP SCBD Provinsi Banten	1 dok
9	Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	1. Koordinasi Pelaksanaan Program-Program Penanggulangan Kemiskinan	2 dok
		2. Pengendalian Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan	2 dok
		3. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program	3 dok

NO	KEGIATAN	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
		- program Penanggulangan Kemiskinan	
		4. Penyusunan Rencana Kerja Penanggulangan Kemiskinan TA. 2013	1 dok
		5. Pelatihan Pro-Poor Planing Budgeting untuk Score Carding and Poverty Mapping	1 dok
		6. Pelatihan Pengelolaan dan Pengolahan Database Kemiskinan	1 dok
10	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pendidikan, Pemerintahan dan Politik	1. Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintah (RAKORBID RPJMD 2012-2017)	3 dok
		2. Fasilitasi dan Verifikasi Rancangan Awal Renja SKPD Mitra	1 dok
		3. Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Pendidikan, Pemerintahan dan Politik	1 dok
		4. Penyusunan Data Informasi Bidang Pemerintahan dan Politik	1 dok
		5. Dokumen Laporan Millenium Development Goals (MDGs) Provinsi Banten	1 dok
		6. Dokumen Laporan Pendidikan Untuk Semua (PUS) Provinsi Banten	1 dok
		7. Perencanaan Program Keluarga Harapan	1 dok

NO	KEGIATAN	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
		(PKH) Provinsi Banten	
		8. Perencanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) Provinsi Banten	1 dok
		9. Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Banten	1 dok
11	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Kesehatan, Kesos, Naker dan PP PA	1. Dokumen Perencanaan Tahunan Bidang Sosmas	3 dok
		2. Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Bidang Sosmas	3 dok
		3. Dokumen Perencanaan Pembangunan KHPPIA	1 dok
		4. Dokumen Perencanaan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	2 dok
		5. Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota Sehat	1 dok
		6. Dokumen Perencanaan RPJMD 2012-2017 Bidang SDM	
12	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Wilayah	1. Fasilitasi Penanganan Infrastruktur Wilayah	1 dok

NO	KEGIATAN	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
		2. Study Kelayakan Financial Stone Crushers dalam mendukung Pembangunan Jembatan Selat Sunda	1 dok
		3. Study Kebutuhan AMP (Aspal Mixing Plant) dalam mendukung Pembangunan Jembatan Selat Sunda	1 dok
		4. Study Kebutuhan Mixerplant dalam Mendukung Pembangunan Jembatan Selat Sunda	1 dok
		5. Pelatihan Program Nawasis PPSP Provinsi Banten	1 dok
		6. Rapat Koordinasi (Rakor) Perencanaan Mitra Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah	1 dok
		7. Penajaman Renja dan Prioritas Program/kegiatan Mitra Bidang Infrastruktur Wilayah Tahun 2013	1 dok
		8. Fasilitasi DAK Bidang Infrastruktur Wilayah Tahun 2013	1 dok
		9. Fasilitasi Konreg Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2013	1 dok
		10. Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian Program AMPL	1 dok
		11. Lokakarya Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Provinsi Banten	1 dok

NO	KEGIATAN	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
		Tahun 2012	
		12. Fasilitasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	1 dok
		13. Lokakarya Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	1 dok
		14. Bimbingan Teknis Perkuatan Kelembagaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2012	1 dok
		15. Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian Program Perumahan dan Permukiman	1 dok
		16. Workshop Penangan Perumahan dan Permukiman Masyarakat Berpenghasilan Rendah	1 dok
		17. Workshop Penataan dan Penanganan Prasarana Transportasi Provinsi Banten	1 dok
		18. Rakorbid Pra musrenbang Penyusunan RPJMD Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah	1 dok
13	Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten	1. Penyusunan TAPKIN dan IKU Provinsi Banten Tahun 2012	2 dok
		2. Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Pelaksanaan Rencana	4 dok

NO	KEGIATAN	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
		Pembangunan Daerah Provinsi Banten Sumber Dana APBD Tahun 2012	
		3. Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Sumber Dana APBN Tahun 2012	8 dok
		4. Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten	2 dok
		5. Tersusunnya Laporan Hasil Pemantauan Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2012	4 dok
		6. Tersusunnya LAKIP Provinsi Banten Tahun 2011	1 dok
		7. Penyusunan LKPj Gubernur Banten Tahun 2011	1 dok
		8. Tersusunnya Pengembangan Model Evaluasi Rencana Pelaksanaan Pembangunan	1 dok
		9. Tersusunnya Pengembangan Sistem Pelaporan APBD	1 dok
		10. Sinergitas Pelaksanaan Program Pembangunan Pusat dan Daerah	1 dok
		11. Tersusunnya Hasil Monitoring Pelaksanaan	1 dok

NO	KEGIATAN	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
		Pembangunan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK)	
14	Koordinasi Anggaran Daerah Perencanaan Pembangunan	1. Penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2013	2 dok
		2. Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012	2 dok
		3. Penyusunan Usulan Prioritas Pendanaan Pemerintah Daerah APBN Tahun Anggaran 2013	1 dok
		4. Sosialisasi Penyusunan Usulan Pendanaan Pemerintah Daerah APBN TA. 2013	1 dok
		5. Penyusunan Kompilasi Usulan Belanja Hibah dan Bansos Perubahan APBD TA. 2012 dan APBD TA. 2013	1 dok
		6. Penyusunan Data Base Perencanaan Anggaran Provinsi Banten	1 Aplikasi
		7. Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Penganggaran Pembangunan	1 dok
15	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Agribisnis dan Bisnis Kelautan	1. Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan SKPD Bidang Agribisnis dan Bisnis Kelautan	1 dok
		2. Fasilitasi Penyusunan Prioritas Pembangunan dan	1 dok dan 1 kali

NO	KEGIATAN	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
		Target Kinerja Tahun 2012-2017	
		3. Validasi Data Bidang Agribisnis dan Bisnis Kelautan	1 dok dan 1 kali
		4. Pembaharuan Data (Up Dating) Bidang Agribisnis dan Bisnis Kelautan	1 dok dan 1 kali
		5. Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Agribisnis dan Bisnis Kelautan	1 dok dan 1 kali
		6. Pembahasan Rancangan Renja Perencanaan Pembangunan Mitra Bidang Agribisnis dan Bisnis Kelautan	1 dok dan 1 kali
		7. Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	1 dok dan 1 kali
		8. Penyempurnaan Renja SKPD Mitra Bidang Agribisnis dan Bisnis Kelautan	1 dok dan 1 kali
		9. Verifikasi Renja SKPD Mitra Bidang Agribisnis dan Bisnis Kelautan	1 dok dan 1 kali
		10. Finalisasi Renja SKPD Mitra Bidang Agribisnis dan Bisnis Kelautan	1 dok dan 1 kali
		11. Konsinyering Renstra SKPD Mitra Bidang Agribisnis dan Bisnis Kelautan	1 dok dan 1 kali
		12. Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Pada Kawasan Pusat Pertumbuhan	1 dok dan 1 kali

NO	KEGIATAN	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
		13. Rapat Koordinasi Kawasan Pusat Pertumbuhan	1 dok dan 1 kali
		14. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kawasan Agropolitan	1 dok dan 1 kali
		15. Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Sentra Produksi	1 dok dan 1 kali
		16. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Sentra Produksi	1 dok dan 1 kali
		17. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	1 dok dan 1 kali
16	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Indagkop, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata	1. Apresiasi Rencana Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang Industri dan dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Investasi, Budaya dan Pariwisata TA. 2012	1 kali
		2. Evaluasi Kinerja SKPD Mitra Bidang Indagkop, Budpar dan Investasi TA. 2011	1 kali
		3. Penyusunan Rancangan Usulan Program dan Kegiatan SKPD Mitra Bidang Indagkop, Budpar dan Investasi TA. 2013	15 buku
		4. Koordinasi Perencanaan Tahunan Subid Indagkop, Budpar dan Investasi	1 kali
		5. Orientasi Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Mitra Bidang Indagkop, Budpar dan	1 kali

NO	KEGIATAN	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
		Investasi Tahun 2012-2017	
		6. Penyusunan Kebijakan Ekonomi Makro Tahun 2012	9 buku
		7. Pra Musrenbang RPJMD Bidang Perekonomian Tahun 2012	1 kali
		8. Workshop Kebijakan Ekonomi Makro Tahun 2012	1 kali
		9. Verifikasi dan penyesuaian Renja Mitra Bidang Industri dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Investasi, Budaya dan Pariwisata TA. 2013	15 buku
		10. Penyusunan Dokumen Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Bidang Perekonomian Tahun 2012	15 buku
		11. Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah	9 buku
		12. Workshop Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Bidang Perekonomian Tahun 2012	9 buku
		13. Penyusunan Dokumen Proyeksi Pendapatan Daerah TA. 2012-2017	9 buku
		14. Penyusunan Dokumen Analisis Capaian Agenda Perekonomian TA. 2007-2012	1 kali

NO	KEGIATAN	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
		15. Penyusunan Rencana Aksi KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Tanjung Lesung dalam Mendukung MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) Koridor Sumatera	9 buku
		16. Workshop Rencana Aksi KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Tanjung Lesung dalam Mendukung MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) Koridor Sumatera	1 kali
		17. Penyusunan Rencana Aksi Industri Logam dan JSS (Jembatan Selat Sunda) dalam Mendukung MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) Koridor Sumatera	1 kali
		18. Workshop Rencana Aksi Industri Logam dan JSS (Jembatan Selat Sunda) dalam Mendukung MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) Koridor Sumatera	1 kali

NO	KEGIATAN	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
		19. Workshop Tabel Input-Output Provinsi Banten Tahun 2012	1 kali
		20. Penyusunan Jurnal Ekonomi dan Pembangunan	1 edisi
		21. Sinergitas Pembangunan Pusat - Daerah Bidang Perekonomian Tahun 2012	5 kali
		22. Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian	5 kali
17	Koordinasi Program Daerah Perencanaan Pembangunan	1. Forum Konsultasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 keg
		2. Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017	1 dok dan 4 keg
		3. Penyelenggaraan Musrenbang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017	1 dok dan 1 keg
		4. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2013	1 dok dan 5 keg
		5. Verifikasi Renja SKPD Provinsi Banten Tahun 2013 Bidang/Urusan Pemerintahan	1 dok dan 1 keg
		6. Verifikasi Renja SKPD Provinsi	1 dok dan 1

NO	KEGIATAN	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
		Banten Tahun 2013 Bidang/Urusan Pengembangan SDM	keg
		7. Verifikasi Renja SKPD Provinsi Banten Tahun 2013 Bidang/Urusan Perekonomian	1 dok dan 1 keg
		8. Verifikasi Renja SKPD Provinsi Banten Tahun 2013 Bidang/Urusan Pengembangan Kawasan dan Wilayah	1 dok dan 1 keg
		9. Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENDA)	1 dok dan 1 keg
		10. Sinkronisasi Perencanaan Program dan Anggaran Pusat – Daerah	1 dok dan 1 keg
		11. Verifikasi Renstra SKPD Provinsi Banten Bidang/Urusan Pemerintahan	1 dok
		12. Verifikasi Renstra SKPD Provinsi Banten Bidang/Urusan Pengembangan SDM	1 dok
		13. Verifikasi Renstra SKPD Provinsi Banten Bidang/Urusan Perekonomian	1 dok
		14. Verifikasi Renstra SKPD Provinsi Banten Bidang/Urusan Pengembangan Kawasan dan Wilayah	1 dok

NO	KEGIATAN	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
		15. Fasilitasi Perencanaan Program Pembangunan	1 dok
18	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan	1. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Provinsi Banten	1 dok
		2. Rakor Kerjasama Pembangunan Provinsi Banten	1 kali
		3. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Wilayah Perbatasan Banten – Jabar	1 dok
		4. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Wilayah Perbatasan Banten – Lampung	1 dok
		5. Rakor evaluasi Rakortas Banten – Lampung	1 dok
		6. Koordinasi Pengembangan Kawasan dan Pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS)	1 dok
		7. Rakor Pengembangan Kawasan dan Pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS)	1 dok
		8. Koordinasi Kerjasama Pembangunan BKSP Jabodetabekjur	1 dok
		9. Kerjasama Pembangunan Musrenbangreg se Jawa-Bali	1 dok
		10. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Mitra Praja Utama (MPU)	1 dok
		11. Koordinasi Kerjasama Antar Kabupaten/Kota	1 dok

NO	KEGIATAN	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
		12. Penyusunan Dokumen Kerjasama Antara Kabupaten/Kota	1 dok
		13. Rakor Kerjasama Antar Kabupaten/Kota	1 rakor
		14. Koordinasi Kerjasama Pemerintah Swasta	1 dok
		15. Rakor Kerjasama Pemerintah Swasta	1 rakor
		16. Kaji Terap Kerjasama Pembangunan antar Kab/Kota	1 dok
19	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1. Evaluasi dan Pengendalian Renja Mitra Bidang Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup	1 dok
		2. Koordinasi dan Konsultasi Penataan Ruang	1 dok
		3. Sosialisasi PERDA RTRW Provinsi Banten 2010-2030	1 kali
		4. Pengembangan Informasi Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan	1 dok
		5. Pendayagunaan Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan	1 dok dan 2 kali
		6. Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	5 kali
		7. Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 dok

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEDA PROVINSI BANTEN 2012

3.1. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal ini adalah akuntabilitas Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten yang merupakan perwujudan kewajiban Bappeda Provinsi Banten untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan tugas pokok dan fungsi melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas dalam hal ini adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang dalam meminta atau pertanggungjawaban dari rencana yang telah dilaksanakan. Sedangkan kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Strategi Bappeda Provinsi Banten yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas kinerja keuangan pada umumnya adalah merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dari anggaran program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, sampai sejauh mana realisasinya dalam menunjang pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Anggaran yang telah digunakan untuk belanja pembangunan terdiri

dari belanja langsung yang dipengaruhi oleh program dan berkinerja dan belanja tidak langsung yang tidak dipengaruhi oleh program yang dalam hal ini tidak berkinerja.

Rencana dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung sampai dengan akhir pelaksanaan anggaran Tahun 2012 dari sebesar Rp 29.849.016.000,- telah direalisasikan atau tercapai sebesar Rp 28.467.176.608,- atau sebesar 95.37 dengan katagori penilaian adalah sangat baik.

Realisasi anggaran untuk belanja tidak langsung dari rencana sebesar Rp. 6.391.016.000,- adalah sebesar Rp. 6.046.143.966,- atau sebesar 94.60% sedangkan untuk belanja langsung dari rencana sebesar Rp. 23.458.000.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 22.421.032.642,00 atau sebesar 95.58% dengan katagori penilaian sangat baik.

Realisasi anggaran untuk belanja langsung yang merupakan *input* dari kegiatan program pembangunan Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012 dari masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

TABEL
RENCANA DAN REALISASI INDIKATOR INPUT (ANGGARAN)
KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN 2012

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)		
		ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
I	Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah Daerah			
1	Pembinaan dan Peningkatan Aparatur Bappeda Provinsi Banten	575.000.000,-	572.436.000,-	99.55
2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran BAPPEDA Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012	3.600.950.000,-	3.520.217.142,-	97.76

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)		
		ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
3	Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana Prasarana Perkantoran BAPPEDA Provinsi Banten	1.827.399.500,-	1.511.739.200,-	82.73
4	Pengadaan Sarana Prasarana Perkantoran BAPPEDA Provinsi Banten	1.846.758.050,-	1.760.502.000,-	95.33
5	Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012	500.000.000,-	498.337.000,-	99.67
6	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1.202.192.500,-	1.177.152.050,-	97.92
7	Penyusunan Dan Penyediaan Data Provinsi Banten	618.000.000,-	566.555.000,-	91.68
8	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	299.999.950,-	294.949.950,-	98.32
II	Perencanaan Pembangunan			
9	Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	700.000.000,-	687.635.000,-	98.23
10	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pendidikan, Pemerintahan dan Politik	925.000.000,-	913.730.500,-	98.78
11	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Kesehatan, Kesos, Naker dan PP PA	904.700.000,-	902.644.000,-	99.77
12	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Wilayah	1.200.000.000,-	1.195.553.500,-	99.63
13	Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten	1.700.000.000,-	1.675.377.000,-	98.55
14	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah	975.000.000,-	899.916.200,-	92.30
15	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Agribisnis dan Bisnis Kelautan	850.000.000,-	849.077.000,-	99.89
16	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Indagkop, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata	1.503.000.000,-	1.501.491.400,-	99.90
17	Koordinasi Perencanaan Program Pembangunan Daerah	2.080.000.000,-	1.792.347.900,-	86.17

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)		
		ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
III	Peningkatan Kerjasama Pembangunan			
18	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan	850.000.000,-	843.265.300,-	99.21
IV	Penataan Ruang			
19	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1.300.000.000,-	1.258.106.500,-	96.78
	J U M L A H	23.458.000.000,-	22.421.032.642,-	95.58

3.2. KINERJA KEGIATAN

Pengukuran kinerja kegiatan adalah pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja masing - masing kegiatan yang terdiri dari *input*, *output* dan *outcome*, serta telah sampai sejauhmana tingkat capaiannya dari rencana yang telah ditetapkan, dan realisasi capaian indikator kinerja input telah diuraikan sebagaimana diatas.

Sedangkan untuk realisasi capaian indikator kinerja dari *out put* dan *out come* kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pada tingkat *out put* capaian kinerjanya secara keseluruhan rata-rata mencapai sebesar 99.53 % dengan penilaian capaian dari pengukuran kinerja tersebut.
2. Pada tingkat *out come* capaian kinerjanya secara keseluruhan rata-rata mencapai sebesar 98.26 % dengan penilaian capaian dari pengukuran kinerja tersebut.

Kondisi dari realisasi capaian kinerja *out put* dan *out put* kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun

Anggaran 2012, dan selanjutnya realisasi capaian menurut dari masing-masing kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV Bulan Desember 2012 adalah sebagai berikut:

TABEL
RENCANA DAN REALISASI CAPAIAN INDIKATOR
KINERJA OUT PUT KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2012

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
1	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan Aparatur Bappeda Provinsi Banten	1. Pelayanan Prima Aparatur Bappeda Provinsi Banten	100 org	100 org	100
		2. Bimbingan Teknis Kearsipan Internal Bappeda Provinsi Banten	40 org	40 org	100
		3. Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan golongan PNS Bappeda Provinsi Banten	2 kali	2 kali	100
		4. Fasilitasi Kenaikan Gaji Berkala PNS Bappeda Provinsi Banten	24 org	24 org	100
		5. Fasilitasi Perkuatan Kelembagaan dan Validasi Data Pegawai Bappeda Provinsi Banten	87 org	87 org	100
		6. Pemutakhiran Data Kepegawaian Bappeda Provinsi Banten	87 org	87 org	100
		7. Pekan Ilmiah Internal Bappeda Provinsi Banten	10 kali	10 kali	100
		8. Fasilitasi	3 org	3 org	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
		Pengiriman Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS			
		9. Koordinasi/Konsultasi Kepegawaian	6 kali	6 kali	100
2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran BAPPEDA Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012	1. Pengadaan Bahan Pakai Habis	12 bulan	12 bulan	100
		2. Pengadaan Bahan Cetak	12 bulan	12 bulan	100
		3. Pengadaan Makan dan Minuman Kantor	12 bulan	12 bulan	100
		4. Pengadaan Jasa Telepon, Listrik dan Pengumuman Lelang, PHBI, PHBN	12 bulan	12 bulan	100
		5. Konsultasi dan Koordinasi Ke Dalam dan Luar Wilayah Provinsi	12 bulan	12 bulan	100
		6. Fasilitasi Penunjang Kegiatan dan Kantor	12 bulan	12 bulan	100
3	Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana Prasarana Perkantoran BAPPEDA Provinsi Banten	1. Pemeliharaan Gedung dan Halaman	12 bulan	12 bulan	100
		2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	12 bulan 18 Unit Roda empat dan 19 Unit Roda dua	12 bulan 18 Unit Roda empat dan 19 Unit Roda dua	100
		3. Pemeliharaan Barang Inventarisasi Kantor	155 unit	155 unit	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
4	Pengadaan Sarana Prasarana Perkantoran BAPPEDA Provinsi Banten	1. Pengadaan Sarana Prasarana Perkantoran	1147 unit	1147 unit	100
5	Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012	1. Penyusunan Dokumen Evaluasi LRA, Neraca dan CaLK SKPD BAppeda Provinsi Banten TA. 2011	1 dok	1 dok	100
		2. Penyusunan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Anggaran Internal Bappeda Provinsi Banten	1 dok	1 dok	100
		3. Penyusunan Dokumen SPP, SPM, SP2D dan SPJ Kegiatan Bappeda Provinsi Banten TA.2012 untuk Periode TW I; TW II; TW III; TW IV.	1 dok	1 dok	100
		4. Penyusunan Dokumen LRA, Neraca dan CaLK Laporan Akuntabilitas Kegiatan Bappeda Provinsi Banten TA. 2012 Periode Semester I dan Semester II	1 dok	1 dok	100
		5. Penyusunan Verifikasi Kode Rekening anggaran dan Penyesuaian Tarif Harga Satuan sesuai Standar Biaya Umum pada Kegiatan Bappeda Provinsi Banten TA. 2012	1 dok	1 dok	100
		6. Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan Pencocokan Data	1 dok	1 dok	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
		Akuntansi dan Data Aset Kegiatan Bappeda Provinsi Banten TA. 2012			
		7. Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Inventarisasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Aparat Pemeriksa Instansi Pemerintah (Inspektorat, Itjen Kemendagri, BPKP dan BPK RI)	1 dok	1 dok	100
		8. Penyusunan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP) TA. 2012	1 dok	1 dok	100
		9. Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Inventarisasi Aset Kegiatan Bappeda Provinsi Banten TA. 2012	1 dok	1 dok	100
		10. Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi Data Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Sumber Dana APBN TA. 2012 Periode TW I; TW II; TW III; TW IV	1 dok	1 dok	100
		11. Penyusunan Dokumen Neraca, LRA dan CaLK Kegiatan Sumber Dana APBN Satker	1 dok	1 dok	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
		Bappeda Provinsi Banten TA. 2012 periode Semester I dan Semester II			
6	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1. Penyusunan Dokumen Rencana Operasional Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012	1 dok	1 dok	100
		2. Penyusunan Dokumen LAKIP Bappeda Provinsi Banten Tahun 2011	1 dok	1 dok	100
		3. Penyusunan Dokumen LKPJ Bappeda Provinsi Banten Tahun 2011	1 dok	1 dok	100
		4. Penyusunan Dokumen LPPD Bappeda Provinsi Banten Tahun 2011	1 dok	1 dok	100
		5. Penyusunan Dokumen Laporan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012	4 dok	4 dok	100
		6. Penyusunan Dokumen RENJA Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013	12 dok	12 dok	100
		7. Penyusunan Dokumen Kerangka Logis dan Perubahan Penganggaran Bappeda Provinsi	4 dok	4 dok	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
		Banten Tahun Anggaran 2012			
		8. Penyusunan Dokumen Kerangka Logis dan Penganggaran Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013	6 dok	6 dok	100
		9. Penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013	1 dok	1 dok	100
		10. Penyelenggaraan Forum SKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Tahun 2012	1 dok	1 dok	100
		11. Penyusunan RENSTRA Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017	1 dok	1 dok	100
		12. Penyusunan TAPKIN dan IKU Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012	2 dok	2 dok	100
		13. Penyusunan SOTK dan TUPOKSI Bappeda Prov. Banten	1 kali	1 kali	100
		14. Penyelenggaraan Forum Bappeda Prov. Banten dan Kab/Kota sep Provinsi Banten	1 kali	1 kali	100
		15. Monitoring Penyusunan Data Makro Pembangunan	1 dok	1 dok	100
7	Penyusunan dan Penyediaan Data	1. Koordinasi dan Konsultasi Data	1 dok	1 dok	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
	Provinsi Banten	Daerah			
		2. Penyusunan Kajian Akademis Pembentukan UPTB Data dan Informasi Bappeda Provinsi Banten	1 dok	1 dok	100
		3. Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan	4 dok	4 dok	100
		4. Penyusunan Profile Informasi Pembangunan	1 dok	1 dok	100
		5. Pelaporan Kinerja Kegiatan	1 dok	1 dok	100
8	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	1. Fasilitasi Monitoring Kegiatan Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan untuk Desentralisasi (Sustainable Capacity Building For Decentralization) di Provinsi Banten	1 dok	1 dok	100
		2. Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENDA)	1 dok	1 dok	100
		3. Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Pelaporan	1 dok	1 dok	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
		Triwulanan APBD (SIMPEL)			
		4. Monitoring Implementasi CB-AP SCBD Kabupaten/Kota	1 dok	1 dok	100
		5. Evaluasi Implementasi CB-AP SCBD Provinsi Banten	1 dok	1 dok	100
9	Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	1. Koordinasi Pelaksanaan Program-Program Penanggulangan Kemiskinan	2 dok	2 dok	100
		2. Pengendalian Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan	2 dok	2 dok	100
		3. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program - program Penanggulangan Kemiskinan	3 dok	3 dok	100
		4. Penyusunan Rencana Kerja Penanggulangan Kemiskinan TA. 2013	1 dok	1 dok	100
		5. Pelatihan Pro-Poor Planing Budgeting untuk Score Carding and Poverty Mapping	1 dok	1 dok	100
		6. Pelatihan Pengelolaan dan Pengolahan Database Kemiskinan	1 dok	1 dok	100
10	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	1. Perencanaan Pembangunan	3 dok	3 dok	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
	Bidang Pendidikan, Pemerintahan dan Politik	Bidang Pemerintah (RAKORBID RPJMD 2012-2017)			
		2. Fasilitasi dan Verifikasi Rancangan Awal Renja SKPD Mitra	1 dok	1 dok	100
		3. Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Pendidikan, Pemerintahan dan Politik	1 dok	1 dok	100
		4. Penyusunan Data Informasi Bidang Pemerintahan dan Politik	1 dok	1 dok	100
		5. Dokumen Laporan Millenium Development Goals (MDGs) Provinsi Banten	1 dok	1 dok	100
		6. Dokumen Laporan Pendidikan Untuk Semua (PUS) Provinsi Banten	1 dok	1 dok	100
		7. Perencanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi Banten	1 dok	1 dok	100
		8. Perencanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) Provinsi Banten	1 dok	1 dok	100
		9. Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Banten	1 dok	1 dok	100
11	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Kesehatan, Kesos, Naker	1. Dokumen Perencanaan Tahunan Bidang	3 dok	3 dok	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
	dan PP PA	Sosmas			
		2. Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Bidang Sosmas	3 dok	3 dok	100
		3. Dokumen Perencanaan Pembangunan KHPPIA	1 dok	1 dok	100
		4. Dokumen Perencanaan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	2 dok	2 dok	100
		5. Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota Sehat	1 dok	1 dok	100
		6. Dokumen Perencanaan RPJMD 2012-2017 Bidang SDM			100
12	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Wilayah	1. Fasilitasi Penanganan Infrastruktur Wilayah	1 dok	1 dok	100
		2. Study Kelayakan Financial Stone Crushers dalam mendukung Pembangunan Jembatan Selat Sunda	1 dok	1 dok	100
		3. Study Kebutuhan AMP (Aspal Mixing Plant) dalam mendukung Pembangunan Jembatan Selat Sunda	1 dok	1 dok	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
		4. Study Kebutuhan Mixerplant dalam Mendukung Pembangunan Jembatan Selat Sunda	1 dok	1 dok	100
		5. Pelatihan Program Nawasis PPSP Provinsi Banten	1 dok	1 dok	100
		6. Rapat Koordinasi (Rakor) Perencanaan Mitra Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah	1 dok	1 dok	100
		7. Penajaman Renja dan Prioritas Program/kegiatan Mitra Bidang Infrastruktur Wilayah Tahun 2013	1 dok	1 dok	100
		8. Fasilitasi DAK Bidang Infrastruktur Wilayah Tahun 2013	1 dok	1 dok	100
		9. Fasilitasi Konreg Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2013	1 dok	1 dok	100
		10. Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian Program AMPL	1 dok	1 dok	100
		11. Lokakarya Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (AMPL) Provinsi Banten Tahun 2012	1 dok	1 dok	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
		12. Fasilitasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	1 dok	1 dok	100
		13. Lokakarya Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	1 dok	1 dok	100
		14. Bimbingan Teknis Perkuatan Kelembagaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2012	1 dok	1 dok	100
		15. Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian Program Perumahan dan Permukiman	1 dok	1 dok	100
		16. Workshop Penangan Perumahan dan Permukiman Masyarakat Berpenghasilan Rendah	1 dok	1 dok	100
		17. Workshop Penataan dan Penanganan Prasarana Transportasi Provinsi Banten	1 dok	1 dok	100
		18. Rakorbid Pra musrenbang	1 dok	1 dok	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
		Penyusunan RPJMD Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah			
13	Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten	1. Penyusunan TAPKIN dan IKU Provinsi Banten Tahun 2012	2 dok	2 dok	100
		2. Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Sumber Dana APBD Tahun 2012	4 dok	4 dok	100
		3. Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Sumber Dana APBN Tahun 2012	8 dok	8 dok	100
		4. Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten	2 dok	2 dok	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
		5. Tersusunnya Laporan Hasil Pemantauan Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2012	4 dok	4 dok	100
		6. Tersusunnya LAKIP Provinsi Banten Tahun 2011	1 dok	1 dok	100
		7. Penyusunan LKPj Gubernur Banten Tahun 2011	1 dok	1 dok	100
		8. Tersusunnya Pengembangan Model Evaluasi Rencana Pelaksanaan Pembangunan	1 dok	1 dok	100
		9. Tersusunnya Pengembangan Sistem Pelaporan APBD	1 dok	1 dok	100
		10. Sinergitas Pelaksanaan Program Pembangunan Pusat dan Daerah	1 dok	1 dok	100
		11. Tersusunnya Hasil Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK)	1 dok	1 dok	100
14	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah	1. Penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2013	2 dok	2 dok	100
		2. Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran	2 dok	2 dok	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
		2012			
		3. Penyusunan Usulan Prioritas Pendanaan Pemerintah Daerah APBN Tahun Anggaran 2013	1 dok	1 dok	100
		4. Sosialisasi Penyusunan Usulan Pendanaan Pemerintah Daerah APBN TA. 2013	1 dok	1 dok	100
		5. Penyusunan Kompilasi Usulan Belanja Hibah dan Bansos Perubahan APBD TA. 2012 dan APBD TA. 2013	1 dok	1 dok	57
		6. Penyusunan Data Base Perencanaan Anggaran Provinsi Banten	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100
		7. Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Penganggaran Pembangunan	1 dok	1 dok	100
15	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Agribisnis dan Bisnis Kelautan	1. Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan SKPD Bidang Agribisnis dan Bisnis Kelautan	1 dok	1 dok	100
		2. Fasilitasi Penyusunan Prioritas Pembangunan dan Target Kinerja Tahun 2012-2017	1 dok dan 1 kali	1 dok dan 1 kali	100
		3. Validasi Data Bidang Agribisnis dan Bisnis	1 dok dan 1 kali	1 dok dan 1 kali	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
		Kelautan			
		4. Pembaharuan Data (Up Dating) Bidang Agribisnis dan Bisnis Kelautan	1 dok dan 1 kali	1 dok dan 1 kali	100
		5. Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Agribisnis dan Bisnis Kelautan	1 dok dan 1 kali	1 dok dan 1 kali	100
		6. Pembahasan Rancangan Renja Perencanaan Pembangunan Mitra Bidang Agribisnis dan Bisnis Kelautan	1 dok dan 1 kali	1 dok dan 1 kali	100
		7. Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	1 dok dan 1 kali	1 dok dan 1 kali	100
		8. Penyempurnaan Renja SKPD Mitra Bidang Agribisnis dan Bisnis Kelautan	1 dok dan 1 kali	1 dok dan 1 kali	100
		9. Verifikasi Renja SKPD Mitra Bidang Agribisnis dan Bisnis Kelautan	1 dok dan 1 kali	1 dok dan 1 kali	100
		10. Finalisasi Renja SKPD Mitra Bidang Agribisnis dan Bisnis Kelautan	1 dok dan 1 kali	1 dok dan 1 kali	100
		11. Konsinyering Renstra SKPD Mitra Bidang Agribisnis dan Bisnis Kelautan	1 dok dan 1 kali	1 dok dan 1 kali	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
		12. Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Pada Kawasan Pusat Pertumbuhan	1 dok dan 1 kali	1 dok dan 1 kali	100
		13. Rapat Koordinasi Kawasan Pusat Pertumbuhan	1 dok dan 1 kali	1 dok dan 1 kali	100
		14. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kawasan Agropolitan	1 dok dan 1 kali	1 dok dan 1 kali	100
		15. Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Sentra Produksi	1 dok dan 1 kali	1 dok dan 1 kali	100
		16. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Sentra Produksi	1 dok dan 1 kali	1 dok dan 1 kali	100
		17. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	1 dok dan 1 kali	1 dok dan 1 kali	100
16	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Indagkop, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata	1. Apresiasi Rencana Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang Industri dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Investasi, Budaya dan Pariwisata TA. 2012	1 kali	1 kali	100
		2. Evaluasi Kinerja SKPD Mitra Bidang Indagkop, Budpar dan Investasi TA. 2011	1 kali	1 kali	100
		3. Penyusunan Rancangan Usulan Program dan Kegiatan SKPD Mitra Bidang	15 buku	15 buku	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
		Indagkop, Budpar dan Investasi TA. 2013			
		4. Koordinasi Perencanaan Tahunan Subid Indagkop, Budpar dan Investasi	1 kali	1 kali	100
		5. Orientasi Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Mitra Bidang Indagkop, Budpar dan Investasi Tahun 2012-2017	1 kali	1 kali	100
		6. Penyusunan Kebijakan Ekonomi Makro Tahun 2012	9 buku	9 buku	100
		7. Pra Musrenbang RPJMD Bidang Perekonomian Tahun 2012	1 kali	1 kali	100
		8. Workshop Kebijakan Ekonomi Makro Tahun 2012	1 kali	1 kali	100
		9. Verifikasi dan penyesuaian Renja Mitra Bidang Industri dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Investasi, Budaya dan Pariwisata TA. 2013	15 buku	15 buku	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
		10. Penyusunan Dokumen Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Bidang Perekonomian Tahun 2012	15 buku	15 buku	100
		11. Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah	9 buku	9 buku	100
		12. Workshop Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Bidang Perekonomian Tahun 2012	9 buku	9 buku	100
		13. Penyusunan Dokumen Proyeksi Pendapatan Daerah TA. 2012-2017	9 buku	9 buku	100
		14. Penyusunan Dokumen Analisis Capaian Agenda Perekonomian TA. 2007-2012	1 kali	1 kali	100
		15. Penyusunan Rencana Aksi KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Tanjung Lesung dalam Mendukung MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi	9 buku	9 buku	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
		Indonesia) Koridor Sumatera			
		16. Workshop Rencana Aksi KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Tanjung Lesung dalam Mendukung MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) Koridor Sumatera	1 kali	1 kali	100
		17. Penyusunan Rencana Aksi Industri Logam dan JSS (Jembatan Selat Sunda) dalam Mendukung MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) Koridor Sumatera	1 kali	1 kali	100
		18. Workshop Rencana Aksi Industri Logam dan JSS (Jembatan Selat Sunda) dalam Mendukung MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) Koridor	1 kali	1 kali	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
		Sumatera			
		19. Workshop Tabel Input-Output Provinsi Banten Tahun 2012	1 kali	1 kali	100
		20. Penyusunan Jurnal Ekonomi dan Pembangunan	1 edisi	1 edisi	100
		21. Sinergitas Pembangunan Pusat - Daerah Bidang Perekonomian Tahun 2012	5 kali	5 kali	100
		22. Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian	5 kali	5 kali	100
17	Koordinasi Perencanaan Program Pembangunan Daerah	1. Forum Konsultasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 keg	1 keg	100
		2. Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017	1 dok dan 4 keg	1 dok dan 4 keg	100
		3. Penyelenggaraan Musrenbang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017	1 dok dan 1 keg	1 dok dan 1 keg	100
		4. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan	1 dok dan 5 keg	1 dok dan 5 keg	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
		Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2013			
		5. Verifikasi Renja SKPD Provinsi Banten Tahun 2013 Bidang/Urusan Pemerintahan	1 dok dan 1 keg	1 dok dan 1 keg	100
		6. Verifikasi Renja SKPD Provinsi Banten Tahun 2013 Bidang/Urusan Pengembangan SDM	1 dok dan 1 keg	1 dok dan 1 keg	100
		7. Verifikasi Renja SKPD Provinsi Banten Tahun 2013 Bidang/Urusan Perekonomian	1 dok dan 1 keg	1 dok dan 1 keg	100
		8. Verifikasi Renja SKPD Provinsi Banten Tahun 2013 Bidang/Urusan Pengembangan Kawasan dan Wilayah	1 dok dan 1 keg	1 dok dan 1 keg	100
		9. Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENDAs)	1 dok dan 1 keg	0	0
		10. Sinkronisasi Perencanaan Program dan Anggaran Pusat – Daerah	1 dok dan 1 keg	1 dok dan 1 keg	100
		11. Verifikasi Renstra SKPD Provinsi Banten	1 dok	1 dok	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
		Bidang/Urusan Pemerintahan			
		12. Verifikasi Renstra SKPD Provinsi Banten Bidang/Urusan Pengembangan SDM	1 dok	1 dok	100
		13. Verifikasi Renstra SKPD Provinsi Banten Bidang/Urusan Perekonomian	1 dok	1 dok	100
		14. Verifikasi Renstra SKPD Provinsi Banten Bidang/Urusan Pengembangan Kawasan dan Wilayah	1 dok	1 dok	100
		15. Fasilitasi Perencanaan Program Pembangunan	1 dok	1 dok	100
18	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan	1. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Provinsi Banten	1 dok	1 dok	100
		2. Rakor Kerjasama Pembangunan Provinsi Banten	1 kali	1 kali	100
		3. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Wilayah Perbatasan Banten – Jabar	1 dok	1 dok	100
		4. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Wilayah Perbatasan Banten – Lampung	1 dok	1 dok	100
		5. Rakor evaluasi Rakortas Banten – Lampung	1 dok	1 dok	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
		6. Koordinasi Pengembangan Kawasan dan Pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS)	1 dok	1 dok	100
		7. Rakor Pengembangan Kawasan dan Pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS)	1 dok	1 dok	100
		8. Koordinasi Kerjasama Pembangunan BKSP Jabodetabekjur	1 dok	1 dok	100
		9. Kerjasama Pembangunan Musrenbangreg se Jawa-Bali	1 dok	1 dok	100
		10. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Mitra Praja Utama (MPU)	1 dok	1 dok	100
		11. Koordinasi Kerjasama Antar Kabupaten/Kota	1 dok	1 dok	100
		12. Penyusunan Dokumen Kerjasama Antara Kabupaten/Kota	1 dok	1 dok	100
		13. Rakor Kerjasama Antar Kabupaten/Kota	1 rakor	1 rakor	100
		14. Koordinasi Kerjasama Pemerintah Swasta	1 dok	1 dok	100
		15. Rakor Kerjasama Pemerintah Swasta	1 rakor	1 rakor	100
		16. Kaji Terap Kerjasama Pembangunan antar Kab/Kota	1 dok	1 dok	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
19	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1. Evaluasi dan Pengendalian Renja Mitra Bidang Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup	1 dok	1 dok	100
		2. Koordinasi dan Konsultasi Penataan Ruang	1 dok	1 dok	100
		3. Sosialisasi PERDA RTRW Provinsi Banten 2010-2030	1 kali	1 kali	100
		4. Pengembangan Informasi Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan	1 dok	1 dok	100
		5. Pendayagunaan Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan	1 dok dan 2 kali	1 dok dan 2 kali	100
		6. Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	5 kali	5 kali	100
		7. Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 dok	1 dok	100

TABEL
RENCANA DAN REALISASI CAPAIAN INDIKATOR
KINERJA OUT COME KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2012

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur	Target Kinerja		%
			Rencana	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
I	Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah				

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur	Target Kinerja		%
			Rencana	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
	Daerah				
1	Pembinaan dan Peningkatan Aparatur Bappeda Provinsi Banten	Sebagai Sarana Peningkatan Wawasan Dan Kemampuan Aparatur Bappeda Provinsi Banten	100% Tahun 2012	100% Tahun 2012	100
2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran BAPPEDA Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012	Ketersediaan Sarana Prasarana Yang Memadai	100 % Pada Tahun 2012	100 % Pada Tahun 2012	100
3	Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana Prasarana Perkantoran BAPPEDA Provinsi Banten	Ketersediaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarna Perkantoran yang memadai	100% Pada Tahun 2012	100% Pada Tahun 2012	100
4	Pengadaan Sarana Prasarana Perkantoran BAPPEDA Provinsi Banten	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung aparatur Pemerintah yang memadai	100% Pada Tahun 2012	100% Pada Tahun 2012	100
5	Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012	Standar Pelayanan Minimal pada SKPD yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik	100% Tahun 2012	100% Tahun 2012	100
6	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaksanaan Rencana Pembangunan SKPD	100% Tahun 2012	100% Tahun 2012	100
7	Penyusunan Dan Penyediaan Data Provinsi Banten	Tersedianya pengembangan data dan sistem informasi perencanaan pembangunan dan pengelolaan SKPD	100% Pada Tahun 2012	100% Pada Tahun 2012	100
8	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaksanaan Rencana Pembangunan SKPD	100 % Tahun 2012	100 % Tahun 2012	100
II	Perencanaan Pembangunan				
9	Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan	Sebagai bahan masukan pelaksanaan	100 % Tahun 2012	100 % Tahun 2012	100

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur	Target Kinerja		%
			Rencana	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
	Kemiskinan Daerah	pembangunan penanggulangan kemiskinan Provinsi Banten			
10	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pendidikan, Pemerintahan dan Politik	Sebagai bahan perencanaan pembangunan Bidang Pendidikan, Politik dan Pemerintahan	100 % Tahun 2012	100 % Tahun 2012	100
11	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Kesehatan, Kesos, Naker dan PP PA	Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah	100 % Tahun 2012	100 % Tahun 2012	100
12	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Program Perumahan dan Permukiman	100 % Tahun 2013	100 % Tahun 2013	100
13	Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten	Data dan Informasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2012	100% Tahun 2012	100% Tahun 2012	100
		Bahan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2013	100%	100%	100
		Data dan Informasi Pertanggungjawaban Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2011	100 % Tahun 2012	100 % Tahun 2012	100
14	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah	Sebagai Bahan Dokumen Penganggaran Tahunan Daerah	100 % Tahun 2012	100 % Tahun 2012	100
15	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Agribisnis dan Bisnis Kelautan	Bahan Penyusunan Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang Agribisnis dan Bisnis Kelautan	100 % Tahun 2012	100 % Tahun 2012	100

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur	Target Kinerja		%
			Rencana	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
16	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Indagkop, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata	Tersedianya Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan Daerah	100 % Tahun 2012	100 % Tahun 2012	100
17	Koordinasi Perencanaan Program Pembangunan Daerah	Sebagai bahan dokumen Perencanaan Jangka Menengah dan Tahunan Daerah	100 % Tahun 2012	100 % Tahun 2012	100
III	Peningkatan Kerjasama Pembangunan				
18	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan	Sebagai bahan Kesepakatan kerjasama pembangunan dengan Pemerintah Wilayah Perbatasan, Regional, Antar Kab/Kota dan Swasta	100 % Tahun 2012	100 % Tahun 2012	100
IV	Penataan Ruang				
19	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rasio Keterpaduan Perencanaan Tata Ruang Wilayah (Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kawasan Yang Sudah Ada Terhadap Jumlah Dokumen Tata Ruang Wilayah Dan Kawasan Yang Direncanakan).	21.40 % Tahun 2012	21.40 % Tahun 2012	100
		Rasio Realisasi Dan Rencana Pada Luas Kawasan Budidaya (Penurunan Menjadi 69,85% Sampai Tahun 2030 Menurut RTRWP)	24.99% Tahun 2012	24.99% Tahun 2012	100
		Rasio Realisasi Dan Rencana Pada Luas Kawasan Lindung (Peningkatan Menjadi 30% Sampai Tahun 2030 Menurut RTRWP)	82.39% Tahun 2012	82.39% Tahun 2012	100

3.3 PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

Pengukuran pencapaian sasaran dimaksud adalah pengukuran kinerja kegiatan pada tingkat capaian program tahunan dari sasaran program yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun sesuai dengan yang terdapat pada Rencana Kerja dan Daftar Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2012.

Pencapaian sasaran pada program dari 5 (lima) program yang dilaksanakan Bappeda Provinsi Banten berdasarkan capaian program pada tahun 2012 capainya rata – rata 100% sehingga dari pengukuran pencapaian sasaran termasuk katagori sangat baik.

Adapun pencapaian pengukuran sasaran yang merupakan indikator kinerja capaian program dari masing- masing kegiatan program diantaranya adalah sebagai berikut:

TABEL
TARGET INDIKATOR KINERJA PROGRAM BAPPEDA PROVINSI
BANTEN TAHUN 2012

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	
				TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
	Ketersediaan sarana - prasarana aparatur pemerintah yang memadai	Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah Daerah	Rasio Penyediaan Barang Jasa Adm. Perkantoran serta pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan	25.87%	25.87%
			Rasio Pembangunan, Pengandaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur	28.05%	28.05%

			Rasio Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaksanaan Rencana Pembangunan SKPD	21.29%	21.29%
			Rasio Penyediaan dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Perencanaan, Pembangunan dan Pengelolaan SKPD	31.69%	31.69%
	Tersedianya Dokumen Rencana Aksi Program - Program Strategis	Perencanaan Pembangunan	Jumlah RAD Penanggulangan Kemiskinan	1 Dok	1 Dok
	Tersedianya dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan		Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Program dan Anggaran Pembangunan	2 Dok	2 Dok
	Tersedianya dokumen penganggaran sesuai kinerja dan kebutuhan		Jumlah Dokumen Penganggaran Tahunan Daerah	2 Dok	2 Dok
	Tersedianya dokumen perencanaan sesuai kebutuhan masyarakat		Jumlah Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan Daerah	1 Dok	1 Dok
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kerjasama pemerintahan	Peningkatan Kerjasama Pembangunan	Jumlah Kesepakatan Kerjasama Pembangunan dengan Pemerintahan Perbatasan, Regional dan Bilateral	85%	85%
	Meningkatnya Fungsi Koordinasi dan Perencanaan Penataan Ruang Daerah	Penataan Ruang	Rasio Keterpaduan Perencanaan Tata Ruang Wilayah (Jml Dok Rencana Tata Ruang Wil dan Kawasan yang sdh ada thd Jml Dok TR Wil dan Kawasan yang direncanakan)	21.4%	21.4%
	Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi		Rasio Realisasi dan Rencana pada Luas kawasan Budidaya (penurunan menjadi 69,85% sampai tahun	24.99%	24.99%

			2029 menurut RTRWP)		
			Rasio Realisasi dan Rencana pada Luas Kawasan Lindung (peningkatan menjadi 30% sampai tahun 2029 menurut RTRWP)	82.39%	82.39%

BAB 4

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten telah tersusun dengan rata-rata capaian dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten dengan implementasi dari kegiatan program yaitu indikator kinerja *input* tercapai 95,81 % dan indikator kinerja *out put* tercapai 100 % dan *out come* tercapai sebesar 100 % Sedangkan tingkat capaian untuk sasaran yang saat kegiatan program dilaksanakan tercapai 100 %.

Berdasarkan capaian dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran sasaran tersebut, maka rata-rata nilai capaian dari pengukuran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2010 sebesar 98.85 % dengan perincian sebagai berikut:

1. Indikator kinerja *input* capaian pengukurannya sebesar 95,81 % dengan nilai sangat baik.
2. Indikator kinerja *out put* capaian pengukurannya sebesar 100 % dengan nilai sangat baik.
3. Indikator kinerja *out come* capaian pengukurannya sebesar 100 % dengan nilai sangat baik.
4. Indikator kinerja capaian program pengukurannya sebesar 100 % dengan nilai sangat baik.

Laporan kinerja adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pelaksanaan kewajiban dari amanat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perbaikan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas ini merupakan pelaksanaan dari instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam keputusan tersebut di jelaskan bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good govermance* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.

Sebagaimana hal tersebut diatas, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 dalam rangka pelaksanaan amanat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 bahwa

dalam rangka penyusunan laporan kinerja ini akan menjadi bahan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011.

Selanjutnya bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan kewajiban untuk disusun pada setiap akhir Tahun Anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengingat fungsi Lakip diantaranya adalah:

1. Sebagai sarana penting dalam melaksanakan reformasi dalam rangka penyelenggaraan tugas, pokok, dan fungsi pembangunan dan pelayanan masyarakat;
2. Sebagai cara dan sarana yang efektif dalam mendorong aparatur meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dan fungsi manajemen kinerja yang konsisten;
3. Sebagai cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintahan atau SKPD berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistimatis dengan sasaran yang terukur secara berkelanjutan.
4. Sebagai alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan dan atau kegagalan dari setiap pimpinan Instansi/SKPD dalam menjalankan Misi sebagai tugas pokok dan fungsi dalam mengemban jabatan.
5. Sebagai cara dan sarana untuk mendorong penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen kelembagaan yang berkelanjutan.
6. Sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang disusun oleh Pemerintah Daerah

Dalam rangka pencapaian pengukuran kinerja baik pengukuran kinerja kegiatan maupun pengukuran sasaran pada pelaksanaannya masih terdapat permasalahan dan kendala diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Masih belum maksimal dukungan sumberdaya aparatur yang kompeten dan berkualitas serta sarana dan prasarana aparatur yang memadai dalam rangka memberikan kontribusi aktif terhadap pembangunan Provinsi Banten;
2. Dalam Perencanaan pengendalian dan evaluasi diantaranya masih belum maksimal dalam penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan baik internal maupun eksternal dilingkungan Bappeda Provinsi Banten;
3. Penyediaan anggaran pada Triwulan I dibatasi oleh DPKAD, tidak selaras dengan kebutuhan anggaran kegiatan bersangkutan;
4. Jadwal agenda Nasional yang berubah secara mendadak berdampak teknis dan non teknis terhadap berubahnya jadwal agenda Provinsi;
5. SPJ tidak tepat waktu yang merupakan dampak dari lemahnya penanganan administrasi keuangan pada lingkup PPTK, maka perlu ditempatkan personil yang tepat;
6. Data pada penyusunan LKPJ masih belum sama;
7. Tidak teranggarkannya kegiatan yang bersifat prioritas;
8. Sistem penunjukkan dan cara penetapan pihak ke-3 yang menanggapi pemeliharaan kebersihan gedung yang masih belum tegas;
9. Adanya kebocoran data-data pengadaan barang/jasa kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan;
10. Data-data dasar yang tersedia tidak lengkap dan akurat;

11. Masih belum optimalnya koordinasi TKPK dengan bidang-bidang;
12. Masih terdapatnya temuan dari hasil pemeriksaan Inspektorat, sehingga perlu solusi dan opsi penanganan agar tidak terulang pada Tahun 2012;
13. Masih terdapatnya aset Bappeda yang dipakai oleh SKPD lain;
14. Adanya perubahan-perubahan aturan baik internal maupun external;
15. Adanya mutasi pegawai ketika tidak memperhatikan momentum;
16. Penyampaian Laporan kegiatan yang tidak tepat waktu;
17. Komposisi pegawai yang tidak seimbang pada unit-unit kerja tertentu;
18. Pengaturan asset (kendaraan dinas) belum tertib;
19. Ruang rapat *Fokus Group Discussion* (FGD) sangat terbatas.
20. Masih adanya Prentensi dan Persepsi atau Maindset masih belum terintegrasi secara optimal sesuai dengan KIS (Koordinasi, Integrasi, Simplifikasi)